

NEWSLETTER

PKSPARLEMEN

KREATIF, ATRAKTIF, SUBSTANTIF

Edisi Oktober | Tahun 2024 No. 59

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Fraksi PKS DPR RI Periode 2024-2029

Siap Berjuang

*Mengemban Amanah Untuk
Indonesia yang Adil dan Sejahtera*



Selamat Berjuang

Fraksi PKS DPR RI Periode 2024-2029: Menggenggam Amanah Untuk Indonesia Yang Adil Dan Sejahtera



Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR RI untuk periode 2024 - 2029 resmi mengemban amanah baru. Dalam semangat yang tak pernah padam, melangkah dengan penuh tekad untuk memperjuangkan aspirasi rakyat dan mewujudkan visi besar Indonesia menuju

Indonesia emas 2045

Sebagai bagian penting dalam representasi politik umat dan rakyat Indonesia, Fraksi PKS mengemban amanah besar untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan keberpihakan pada nilai-nilai Islam yang rahmatan lil 'alamin. Dengan komposisi anggota yang

semakin solid dan visi yang semakin fokus, Fraksi PKS diharapkan mampu menjadi motor penggerak perubahan yang positif di parlemen.

PKS dikenal sebagai partai yang konsisten dalam memperjuangkan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan sosial, serta memperjuangkan keadilan bagi

seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang termarginalkan. Dengan fraksi baru ini, PKS di DPR RI berikhtiar terus memperkuat fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran demi terwujudnya kebijakan yang pro-rakyat.

Tantangan ke depan tentu tidak ringan. Berbagai isu nasio-

nal seperti peningkatan kesejahteraan ekonomi, pemenuhan hak-hak dasar rakyat, penegakan hukum yang adil, serta penguatan sistem demokrasi akan menjadi sorotan utama. Fraksi PKS harus berada di garda terdepan untuk memastikan

Selamat Berjuang Fraksi PKS DPR RI Periode 2024 - 2029: Menggenggam Amanah Untuk Indonesia Yang Adil Dan Sejahtera

« SEBELUMNYA

bahwa kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil.

Semangat bersama melayani rakyat menjadi landasan kuat bagi Fraksi PKS dalam melaksanakan tugas di parlemen. Amanah yang diberikan oleh rakyat adalah tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, Fraksi PKS harus optimis bahwa perjuangan mereka di parlemen akan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Indonesia yang lebih baik.

Kami juga menyadari bahwa kerja-kerja legislatif tidak dapat berjalan sendiri. Oleh karena itu, Fraksi PKS akan terus membangun komunikasi dan kolaborasi yang kuat dengan berbagai pihak, baik dengan pemerintah, masyarakat sipil, maupun elemen-elemen lain yang berkomitmen untuk kemajuan bangsa. Dialog yang terbuka dan produktif menjadi kunci utama dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi bangsa ini.

Tentu, perjuangan ini

bukan hanya tanggung jawab para wakil rakyat di Senayan, tetapi juga membutuhkan dukungan penuh dari seluruh elemen partai dan masyarakat. Sinergi antara Fraksi PKS dengan rakyat akan menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan kebijakan yang berdampak luas. Masyarakat berharap PKS tetap konsisten menjaga nilai-nilai keislaman, transparansi, dan keadilan dalam setiap perjuangannya. Perubahan ini membawa tantangan dan kesempatan baru bagi setiap anggota fraksi untuk berkontribusi dalam mewujudkan cita-cita dan aspirasi rakyat.

Kepada seluruh anggota Fraksi PKS DPR RI periode 2024 - 2029, kami ucapkan Selamat Berjuang! Semoga Allah SWT selalu memberikan kekuatan dan petunjuk dalam menjalankan tugas mulia ini. Harapan rakyat kini berada di pundak, dan kami yakin, dengan kerja keras, ketulusan, serta keikhlasan, masa depan Indonesia yang lebih baik dapat tercapai. Allahu Akbar!

Humas FPKS DPR RI



Tantangan ke depan tentu tidak ringan. Berbagai isu nasional seperti peningkatan kesejahteraan ekonomi, pemenuhan hak-hak dasar rakyat, penegakan hukum yang adil, serta penguatan sistem demokrasi akan menjadi sorotan utama. Fraksi PKS harus berada di garda terdepan untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Kreatif, Atraktif, Substantif

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI



image istimewa

Deflasi Lima Bulan Terakhir, Politisi PKS : Bukti Adanya Tekanan pada Perekonomian Nasional

Jakarta (10/10) --- Baru baru ini Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap pada bulan September 2024 Indonesia kembali mengalami deflasi 0,12% secara bulanan.

Ini adalah deflasi kelima berturut-turut selama 2024. Menurut Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati.

"Situasi ini tidak lazim, sekaligus menandakan bahwa kondisi perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang tidak biasa," ungkapnya di Komplek Palemen DPR RI, Senayan, Jakarta (10/10).

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini juga menggambarkan, deflasi berturut-turut pertama kali terjadi pada Mei 2024 lalu, sebesar 0,03% (mtm). Lalu di Juni menyentuh 0,08 % dan tak lebih baik pada Juli dengan 0,18%.

"Deflasi kemudian mulai membaik pada Agustus yakni kembali ke level 0,03%. Deflasi kembali memburuk pada bulan September 2024 terlihat lebih dalam 0,12%, merupakan deflasi kelima pada tahun 2024 secara bulanan," ungkapnya.

Menurut Anis, jika diamati lebih dalam, dalam lima bulan terakhir deflasi terjadi diikuti dengan perlambatan indikator-indikator makro ekonomi yang terjadi.

"Jadi deflasi ini menunjukkan bahwa memang terjadi penurunan daya beli di masyarakat. Penurunan daya

beli ini terjadi karena adanya fenomena penurunan jumlah *_middle class income_*, selain itu penutupan pabrik di sektor industri manufaktur membuat gelombang PHK. Sehingga menyebabkan banyak masyarakat yang kemudian menahan konsumsinya," katanya.

Anis juga menyebut bahwa fenomena deflasi ini perlu dikaji dari dua sudut pandang ekonomi, yaitu sisi demand (permintaan) dan sisi supply (penawaran), sehingga bisa terlihat fenomena deflasi terhadap perekonomian nasional yang terjadi dalam lima bulan terakhir.

Menurut Legislator Perempuan PKS ini, terjadinya perlambatan ekonomi global bisa menjadi pemicu turunnya permintaan konsumen secara global, termasuk Indonesia.

"Turunnya permintaan konsumen dapat terlihat dari pertumbuhan kredit terutama kredit UMKM. Sampai dengan pertengahan tahun 2024, kredit perbankan tumbuh 12,36% (yoy). Pertumbuhan kredit perbankan tersebut, banyak ditopang oleh kredit usaha besar (korporasi), tumbuh

Deflasi Lima Bulan Terakhir, Politisi PKS : Bukti Adanya Tekanan pada Perekonomian Nasional

« SEBELUMNYA

15,89% (yoy). Sayangnya, pertumbuhan kredit korporasi tidak mengalir ke sektor UMKM hanya tumbuh 5,68% (yoy). Begitu pula dengan sektor ekonomi yang banyak menyerap tenaga kerja seperti industri 9,94% (yoy) dan perdagangan 9,87% (yoy)," ungkapnya.

Anis menyebut, dari sisi dunia usaha terlihat bahwa, indikator dunia usaha juga menunjukkan tekanan, yaitu dari data Purchase Managers' Index (PMI), yang menjadi gambaran kondisi bisnis di sektor produksi barang. Sejak April 2024, PMI terus mengalami penurunan, dan bahkan sejak bulan Juli 2024 mengalami kontraksi, yaitu indikator PMI yang turun di bawah 50.

"Indeks PMI Indonesia mengalami kontraksi, berada

pada zona merah atau tidak ada perubahan dibawah angka 50,0 selama tiga bulan berturut-turut, hingga September 2024," katanya.

Politikus PKS ini menyebut bahwa, Indikator-indikator ekonomi dan keuangan tersebut, menunjukkan bahwasanya perekonomian Indonesia sedang mengalami tekanan yang tidak ringan, sehingga menyebabkan terjadinya penurunan daya beli masyarakat.

"Oleh sebab itu, Pemerintah dan BI perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk menggalakkan kembali perekonomian. Salah satunya mempertimbangkan kembali kenaikan PPN sebesar 12% tahun 2025 dan kembali menurunkan tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia lebih rendah," katanya.



jika diamati lebih dalam, dalam lima bulan terakhir deflasi terjadi diikuti dengan perlambatan indikator-indikator makro ekonomi yang terjadi. Jadi deflasi ini menunjukkan bahwa memang terjadi penurunan daya beli di masyarakat. Penurunan daya beli ini terjadi karena adanya fenomena penurunan jumlah middle class income, selain itu penutupan pabrik di sektor industri manufaktur membuat gelombang PHK. Sehingga menyebabkan banyak masyarakat yang kemudian menahan konsumsinya,"

Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta I



image istimewa

Legislator Senayan Dukung Putra Terbaik Indonesia Jadi Sekjen OKI

Jakarta (10/10) --- Arah kebijakan luar negeri pemerintahan Prabowo diyakini akan lebih proaktif ketimbang pendahulunya Joko Widodo. Diplomasi internasional yang dilakukan Prabowo nantinya akan sejalan dengan visinya untuk meningkatkan peran global Indonesia, sebagai bangsa yang kuat dan dihormati secara internasional.

“Salah satu visi Pak Prabowo itu adalah bagaimana memosisikan Indonesia sebagai pemain kunci di panggung global. Nah dalam waktu tak lama lagi akan ada pemilihan Sekjen OKI (Organisasi Kerja sama Islam). Saya kira Indonesia harus ambil peran itu,” ujar legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Habib Idrus Salim Al Jufri, di Jakarta, Kamis (10/10)

Berdasarkan catatan Habib Idrus, sejak awal berdiri di Rabat, Maroko tahun 1969 silam, belum ada orang Indonesia yang didapat jadi Sekjen OKI.

“Kini saatnya ada orang Indonesia menjabat Sekjen OKI. Kita dukung putra terbaik Indonesia jadi Sekjen OKI. Kita support kebijakan luar negeri Pak Prabowo,” ujar Habib Idrus.

Dia menyebut, sejak terpilih sebagai presiden, Prabowo menunjukkan fokus yang kuat pada kebijakan luar negeri. Prabowo, masih dalam kapasitasnya sebagai menteri

pertahanan, setidaknya sudah mengunjungi lebih dari 10 negara seperti Singapura, China, Jepang, Rusia, Turki, dan Australia.

“Kita semua tahu Pak Prabowo punya latar belakang pengalaman internasional yang luas dan luwes dalam berinteraksi dengan pemimpin asing. Ini modal penting untuk mengembalikan peran Indonesia di kancah global,” kata Habib Idrus.

Dia menilai, Prabowo akan menunjukkan sikap tegas dalam isu-isu global. Salah satunya adalah bagaimana Prabowo mengkritik Barat atas standar ganda dalam penanganan konflik Israel-Hamas.

“Sikap seperti ini membuat kebijakan luar negeri bebas-aktif Indonesia yang tradisional agak bergeser. Selama ini negara cenderung menghindari keberpihakan pada blok tertentu, tapi sikap



Legislator Senayan Dukung Putra Terbaik Indonesia Jadi Sekjen OKI

« SEBELUMNYA

Prabowo dalam hal ini lebih proaktif,” katanya.

Negara-Negara OKI

OKI adalah singkatan dari Organisasi Kerja Sama Islam, yaitu organisasi antarpemerintah yang bertujuan memperkuat kerja sama dan solidaritas antara negara-negara anggota. OKI juga berfungsi untuk melindungi hak dan kepentingan dunia Islam.

OKI dibentuk pada 22–25 September 1969 di Rabat, Maroko, setelah para pemimpin negara-negara Islam mengadakan konferensi. OKI merupakan organisasi

antarpemerintah terbesar kedua setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Markas besar OKI berada di Jeddah, Kerajaan Arab Saudi.

Indonesia merupakan anggota OKI dan salah satu forum yang digunakan untuk menyuarakan dukungan kepada rakyat Palestina. Indonesia juga masuk ke dalam OKI untuk memajukan perekonomiannya dalam bidang perdagangan non migas.

Sekretaris Jenderal OKI adalah pejabat administratif utama organisasi, dipilih dari antara warga negara anggota untuk jangka waktu lima tahun.

Berikut pejabat Sekretaris Jenderal OKI hingga saat ini:

Pejabat Sekretaris Jenderal OKI hingga saat ini:

1. Tunku Abdul Rahman (Malaysia) 1971-1973
2. Hassan Al-Touhami (Mesir) 1974-1975
3. Amadou Karim Gaye (Senegal) 1975-1979
4. Habib Chatty (Tunisia) 1979-1984
5. Syed Sharifuddin Pirzada (Pakistan) 1985-1988
6. Dr. Hamid Al-Ghabid (Nigeria) 1989-1996
7. Dr. Azeddine Laraki (Maroko) 1997-2000
8. Dr. Abdelouahed Belkeziz (Maroko) 2001-2004
9. Prof. Ekmeleddin Ihsanoğlu (Turkiye) 2005-2013
10. Iyad Ameen Madani (Arab Saudi) 2014-2016
11. Dr. Yousef bin Ahmad Al-Othaimen (Arab Saudi) 2016-2021
12. Hissein Brahimi Taha (Chad) 17 Nov 2021-sekarang



“Kita semua tahu Pak Prabowo punya latar belakang pengalaman internasional yang luas dan luwes dalam berinteraksi dengan pemimpin asing. Ini modal penting untuk mengembalikan peran Indonesia di kancah global,”

HABIB IDRUS SALIM ALJUFRI, Lc., M.B.A.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Banten III

Anggota FPKS Berikan Saran Konstruktif Program Makan Bergizi Gratis Presiden Terpilih Prabowo Subianto

Jakarta (13/10) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Alifudin, menyampaikan saran konstruktif terhadap program Makan Bergizi Gratis yang menjadi bagian dari program kerja Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Meskipun program ini bertujuan mulia untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui akses makanan bergizi, Alifudin menilai bahwa pelaksanaannya memerlukan perencanaan yang lebih matang dan pendekatan yang lebih holistik.

Alifudin menyatakan bahwa sementara ia mendukung prinsip dasar program ini, dan ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan agar implementasinya lebih tepat sasaran dan efektif diantaranya.

"Pertama, Ketepatan Sasaran Program. Saya mengkritisi bahwa program ini mungkin menghadapi tantangan besar dalam hal pendistribusian. Menurut saya Program seperti ini harus memiliki target yang jelas," tegas Alifudin.

Jika tidak direncanakan dengan baik, katanya, ada risiko bahwa makanan bergizi ini justru tidak sampai kepada mereka yang paling membutuhkan, seperti masyarakat di daerah-daerah terpencil dan kelompok rentan.

"Dan juga pemerintah harus memastikan sistem pendataan yang akurat untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok yang paling membutuhkan bantuan," pungkasnya. **Kedua,** lanjut Alifudin, Potensi Pemborosan Anggaran. Alifudin mengingatkan bahwa meskipun program ini tampak bermanfaat, pengelolaan anggaran harus dilakukan dengan hati-hati. Alifudin juga menegaskan bahwa dalam skala nasional, program seperti

ini memerlukan dana yang sangat besar.

"Tanpa adanya pengawasan yang ketat, tentunya ada potensi pemborosan anggaran atau distribusi yang tidak efisien. Saya meminta adanya transparansi dalam alokasi anggaran dan mekanisme pengawasan yang kuat," tandas Anggota DPR RI dari Dapil Kalimantan Barat I ini.

Ketiga, imbuhnya, Sustainability Program. Menurut Alifudin, program Makan Bergizi Gratis harus dirancang sebagai kebijakan yang berkelanjutan, bukan hanya solusi jangka pendek.

"Pemerintah juga harus memikirkan bagaimana memberdayakan masyarakat untuk mandiri secara gizi, bukan sekadar memberikan bantuan sementara," ujarnya. **Keempat,** tambah Alifudin, Penguatan Edukasi Gizi. Ia menekankan bahwa program ini harus dibarengi dengan edukasi mengenai pentingnya asupan gizi yang baik. Memberikan makanan bergizi gratis tanpa mengedukasi masyarakat



"Saya mendukung setiap inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, namun kita harus memastikan bahwa program tersebut benar-benar dirancang untuk kepentingan masyarakat luas, dan bukan sekadar program populis yang tidak memiliki dampak jangka panjang,"

H. ALIFUDIN, S.E., M.M.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Kalimantan Barat I

mengenai pentingnya pola makan yang sehat akan sia-sia.

"Program ini perlu melibatkan penyuluhan gizi untuk

memastikan bahwa masyarakat memahami bagaimana

menjaga asupan gizi mereka secara berkelanjutan," urainya.



Anggota FPKS: Perlu Dukungan Guna Tingkatkan Daya Beli Masyarakat dan Keberlangsungan Pengusaha

Jakarta (10/10) — Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VII, Jalal Abdul Nasir, menyoroti kondisi daya beli masyarakat yang semakin menurun serta tantangan yang dihadapi oleh pengusaha untuk tetap bertahan di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu.

Menurutnya, situasi ini membutuhkan perhatian serius dari Pemerintah dan berbagai pihak untuk memberikan dukungan yang lebih komprehensif.

Dalam pernyataannya, Jalal menjelaskan bahwa saat ini banyak masyarakat, khususnya di wilayah Jawa Barat, mengalami penurunan daya beli akibat meningkatnya biaya hidup dan terbatasnya lapangan pekerjaan.

"Masyarakat merasakan langsung dampak kenaikan harga bahan pokok dan kebutuhan sehari-hari. Hal ini membuat daya beli mereka semakin lemah," ujarnya.

Selain itu, Jalal juga menekankan pentingnya dukungan kepada para pengusaha, terutama pengusaha kecil dan menengah, agar dapat bertahan di tengah persaingan yang semakin ketat dan tantangan ekonomi global.

"Pengusaha, terutama UMKM, perlu disupport agar tetap eksis. Mereka adalah

tulang punggung ekonomi kita, dan tanpa dukungan yang memadai, keberlangsungan usaha mereka bisa terancam," tambahnya.

Menurutnya, salah satu bentuk dukungan yang bisa diberikan adalah dengan meningkatkan akses permodalan bagi pengusaha kecil dan menengah, serta memperkuat program bantuan sosial yang dapat langsung menysar masyarakat yang membutuhkan.

"Kita harus menciptakan kebijakan yang memberikan kemudahan akses permodalan, insentif pajak, serta program bantuan langsung yang bisa meringankan beban masyarakat," tegasnya.

Jalal juga berharap pemerintah daerah dan pusat bisa berkolaborasi dalam menghadapi tantangan ini, serta memberikan perhatian khusus pada kebijakan-kebijakan yang mendukung pemulihan ekonomi nasional.

"Kita butuh solusi jangka panjang yang terintegrasi agar daya beli masyarakat pulih dan pengusaha bisa tetap bertahan dan berkembang," tutupnya.

Jalal Abdul Nasir menegaskan, sebagai wakil rakyat, pihaknya akan terus memperjuangkan kepentingan masyarakat dan pengusaha di daerah pemilihannya agar dapat menghadapi tantangan ini dengan baik.

Salah satu bentuk dukungan yang bisa diberikan adalah dengan meningkatkan akses permodalan bagi pengusaha kecil dan menengah, serta memperkuat program bantuan sosial yang dapat langsung menysar masyarakat yang membutuhkan.

H. JALAL ABDUL NASIR, AK.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VII

Aleg PKS: PP 26 tahun 2023 Soal Hasil Ekspor Pasir Laut Bisa Merusak dan Merugikan Nelayan

Semarang (12/10) --- Entah apa yang ada dalam rencana Pemerintah membolehkan ekspor pasir laut setelah 20 tahun di larang. Kenapa dilarang selama ini? Inilah dampak buruknya.

Menurut Riyono setidaknya ada 10 dampak serius soal ekspor pasir laut ini. Pertama, Meningkatkan abrasi pesisir pantai dan erosi pantai.

"Kedua, Menurunkan kualitas lingkungan perairan laut dan pesisir pantai. Ketiga, meningkatnya pencemaran pantai. Empat, Penurunan kualitas air laut yang menyebabkan semakin keruhnya air laut," sebut Riyono.

Lima, imbuhnya, rusaknya wilayah pemijahan ikan dan daerah asuhan. Enam, Menimbulkan turbulensi yang menyebabkan peningkatan kadar padatan tersuspensi di

dasar perairan laut.

"Tujuh, Meningkatkan intensitas banjir air rob, terutama di pesisir daerah yang terdapat penambangan pasir laut. Delapan, Merusak ekosistem terumbu karang dan fauna yang mendiami ekosistem tersebut," pungkasnya.

Sembilan, Semakin tingginya energi gelombang atau ombak yang menerjang pesisir pantai atau laut.

Hal ini dikarenakan dasar perairan yang sebelumnya terdapat kandungan pasir laut menjadi sangat curam dan dalam sehingga hampasan energi ombak yang menuju ke

bibir pantai akan menjadi lebih tinggi karena berkurangnya peredaman oleh dasar perairan pantai.

Sepuluh, Timbulnya konflik sosial antara masyarakat yang pro-lingkungan dan para penambang pasir laut.

"Sepuluh alasan di atas memberikan pemahaman kenapa ekspor pasir laut itu dilarang selama 20 tahun. Lalu kenapa tiba-tiba sekarang diperbolehkan? Tanya Riyono Aleg FPKS DPR Dapil VII Jatim Konflik akibat

penambangan pasir laut sudah banyak terjadi, kasus 7 maret 2020 di Lampung Timur adanya pembakaran kapal oleh rakyat mengakibatkan konflik antar pengusaha dan masyarakat lokal.

"Jika sekarang diperkuat melalui PP maka potensi konflik akan semakin luas dan merugikan nelayan kecil," ujarnya.

Selain itu lahirnya PP ini diduga banyak kepentingan yang berpihak kepada pengusaha besar, dasar untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri tidak sebanding dengan kerusakan yang akan ditimbulkan akibat penambangan pasir laut ini.

"Jika PP ini dijalankan maka menjadi ancaman nyata akan hilangnya pulau - pulau kecil dan terluar di NKRI, trus jika banyak kerusakan yang kenapa PP ini terbit? Presiden harusnya membatalkan PP ini" tegas Riyono.



"Jika PP ini dijalankan maka menjadi ancaman nyata akan hilangnya pulau - pulau kecil dan terluar di NKRI, trus jika banyak kerusakan yang kenapa PP ini terbit? Presiden harusnya membatalkan PP ini"

RIYONO, S.Kel., M.Si.
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Timur VII



Target 100 Hari Kerja, Aleg PKS Canangkan Program Pelatihan Pekerja Industri dan Wirausaha Baru

Jakarta (12/10) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Meitri Citra Wardani menyatakan keseriusannya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di daerah pemilihannya yang meliputi Mojokerto, Nganjuk, Madiun, dan Jombang.

Hal itu dia canangkan Meitri, dalam target 100 hari kerja sesuai pelantikannya sebagai wakil rakyat.

“Banyak industri yang tumbuh di kapal kami, khususnya di Mojokerto dan Madiun dimana kita bisa banyak temukan mulai dari industri kreatif, manufaktur, hingga pengolahan makanan dan tekstil. Geliat industri ini perlu dijaga dalam memberikan sumbangsih positif bagi perputaran roda ekonomi daerah, salah satunya dengan memastikan para SDM di daerah memiliki keterampilan memadai yang dibutuhkan oleh industri,”

Meitri Citra Wardani, Sabtu (12/10).

Anggota DPR Dapil Jawa Timur VIII ini membeberkan sejumlah rencana kerja yang akan dilakukannya. Meitri mengungkapkan pihaknya akan menggandeng sejumlah mitra strategis dari unsur pemerintah untuk berkolaborasi meningkatkan kualitas para pekerja di industri terkait.

“DPR dan pemerintah memiliki concern yang sama soal bagaimana kualitas SDM kita bisa ditingkatkan dari segi etos kerja serta keterampilan teknisnya. Untuk itu, ini menjadi peluang yang bagus bagi

konstituen kami khususnya yang bekerja di pabrik agar bisa ditingkatkan keterampilannya, melesat produktivitasnya sehingga terbuka peluang mereka untuk memiliki jenjang karir yang lebih baik di industri. Atas dasar itu, tugas DPR adalah menjembatani peluang-peluang baik itu agar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, politisi PKS yang juga pengusaha ini berkomitmen mendorong pertumbuhan wirausaha di daerah pemilihannya. Meitri mengungkapkan daerah pemilihannya menyimpan sejumlah komoditas penting yang memiliki nilai manfaat ekonomi strategis.

“Seperti misalnya di Jombang dan Nganjuk, merupakan penghasil utama beras, kopi, tebu, serta buah-buahan. Saya berpikir bagaimana komoditas ini bisa ditingkatkan nilai ekonominya. Salah satunya, kami akan menacanakan program pelatihan untuk mengolah sumberdaya alam itu. Output yang diharapkan diantaranya pertumbuhan lebih banyak barista dan kafe di Jombang, kemudian mendorong agar komoditas-komoditas di kapal kami ini bisa masuk ke pengadaan di dinas, pemerintah, hingga BUMN, bahkan bisa mendorong ekspor ke luar negeri,” jelasnya.

Meitri menambahkan, sel-



“DPR dan pemerintah memiliki concern yang sama soal bagaimana kualitas SDM kita bisa ditingkatkan dari segi etos kerja serta keterampilan teknisnya. Untuk itu, ini menjadi peluang yang bagus bagi konstituen kami khususnya yang bekerja di pabrik agar bisa ditingkatkan keterampilannya,

Hj. MEITRI CITRA WARDANI, S.H.

Anggota Fraksi PKS DPR RI
Dapil Jawa Timur VIII

ain berdasarkan pada potensi daerah, basis program pelatihan kerja yang dicanangkannya tersebut juga dapat menyesuaikan kebutuhan konstituen.

“Masyarakat kami juga bisa mengusulkan apa yang mereka butuhkan semisal pelatihan konveksi, pembuatan

pastry, barista kopi, bengkel las, servis alat rumah tangga, hingga perbengkelan sepeda motor. Aspirasi ini yang kemudian akan kita perjuangkan lewat mitra kami di pemerintah dan akan kami kawal hingga terlaksana sesuai kebutuhan konstituen,” tandasnya.



image istimewa

Israel Jadi Anak Emas karena Bebas Sanksi Sepakbola, Aleg PKS : FIFA tak Konsisten!

Jakarta (05/10) --- Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Abdul Fikri Faqih melontarkan kritik pedas terhadap organisasi sepakbola dunia FIFA. Hal itu lantaran FIFA dinilai menganakemaskan Israel dalam penerapan sanksi.

Pria yang akrab disapa Fikri ini mengungkapkan FIFA tak pernah memberikan sanksi kepada federasi sepakbola Israel, IFA.

Padaahal, kata Fikri, negara Israel hingga saat ini masih melakukan kejahatan genosida di Palestina dan Lebanon.

Pada tahun 2022 lalu, kata Fikri, FIFA tegas dengan memberikan hukuman kepada Rusia di Piala Dunia Qatar 2022 sebagai tanggapan atas serangannya terhadap Ukraina.

Namun begitu Israel menyerang dan bahkan melanggar hak asasi manusia (HAM) di Palestina, FIFA tidak menjatuhkan sanksi kepada IFA.

Politisi asal Kabupaten Tegal ini juga menyebut pada akhirnya FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20.

Hal itu terjadi karena ada penolakan dari masyarakat Indonesia terhadap kehadiran tim nasional Israel.

Terbaru, Israel kembali membuktikan statusnya sebagai anak emas FIFA. Padahal sebelumnya, komite disiplin

FIFA akan menyelidiki dugaan pelanggaran aturannya oleh IFA.

Hal itu lantaran Asosiasi Sepak Bola Palestina (PFA) meminta agar Israel diskors dari sepak bola internasional pada Mei karena perang di Gaza.

PFA yakin federasi Israel telah melakukan pelanggaran peraturan FIFA dan menyerukan sanksi terhadap tim dan klub nasional negara tersebut.

Namun FIFA kemudian memutuskan tidak jadi menjatuhkan skorsing terhadap federasi sepak bola Israel.

Sebagai gantinya, FIFA meminta penyelidikan disiplin atas kemungkinan diskriminasi yang dituduhkan oleh para pejabat sepak bola Palestina.

Komite Disiplin FIFA akan diberi mandat untuk memulai penyelidikan atas dugaan pelanggaran diskriminasi yang diajukan oleh Asosiasi Sepak Bola Palestina.

Kondisi yang kemudian disebut standard ganda itu, kata Fikri, merupakan hal yang

Israel Jadi Anak Emas karena Bebas Sanksi Sepakbola, Aleg PKS : FIFA tak Konsisten!

« SEBELUMNYA

seharusnya tidak dilakukan oleh lembaga tertinggi sepakbola dunia.

Untuk itu, Fikri juga mendorong PSSI sebagai bagian dari FIFA juga harus berperan mendorong agar keadilan juga ditegakkan oleh FIFA untuk Palestina.

“Kami di PKS kecewa FIFA tidak bersikap konsisten dan cenderung memiliki standard ganda, harusnya FIFA konsisten menjaga nilai kemanusiaan,” jelasnya.

Fikri memastikan PKS sebagai salah satu elemen

bangsa yang peduli terhadap keadilan bagi Palestina akan terus menyuarakan agar lembaga internasional untuk lebih tegas dalam menghadapi Israel negara yang melakukan pelanggaran HAM.

“Pelanggaran HAM Israel dilakukan berulang kali, sehingga kami minta semua lembaga internasional lebih tegas terhadap Israel,” pungkasnya.

Sebelumnya, seruan pembelaan terhadap Palestina juga diserukan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani.

Pada sesi debat Sidang Majelis Umum PBB ke-79 di

markas besar PBB, New York, Amerika Serikat, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi membela Palestina dalam menanggapi pernyataan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang disampaikan sehari sebelumnya yang menyatakan Israel mencari perdamaian.

Retno dengan tegas menantang klaim tersebut.

“Benarkah? Bagaimana kita bisa mempercayai kata-kata itu? Kemarin, ketika dia berada di sini, Israel melakukan serangan udara besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya di Beirut. Perdana Menteri Netanyahu ingin perang terus berlanjut. Kita harus menghentikannya. Saya ulang, kita harus menghentikannya,” tegas Retno.

Sementara, Ketua MPR RI terpilih periode 2024-2029, Ahmad Muzani, dalam pidato pelantikannya menyampaikan kekhawatirannya terhadap kondisi keamanan global yang kian memanas, khususnya di kawasan Timur Tengah.

Muzani mengingatkan bahwa konflik ini bisa mempengaruhi stabilitas Indonesia, dan oleh karena itu, ia meminta pemerintah untuk berperan aktif dalam memadamkan konflik di Gaza serta memperjuangkan kemerdekaan Palestina.



Negara Israel hingga saat ini masih melakukan kejahatan genosida di Palestina dan Lebanon. Pada tahun 2022 lalu, kata Fikri, FIFA tegas dengan membeirikan hukuman kepada Rusia di Piala Dunia Qatar 2022 sebagai tanggapan atas serangannya terhadap Ukraina. Namun begitu Israel menyerang dan bahkan melanggar hak asasi manusia (HAM) di Palestina, FIFA tidak menjatuhkan sanksi kepada IFA.

Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah IX



Reni Astuti Dorong Kebijakan Nasional: Pendidikan Tinggi dan Kesempatan Kerja Jadi Prioritas

Jakarta (09/10) --- Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Reni Astuti menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan pendidikan dan kesempatan kerja bagi anak-anak Indonesia, khususnya di Surabaya.

Reni menyampaikan visinya agar setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang jelas setelah lulus sekolah, baik itu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau langsung bekerja.

Menurut Reni, tidak semua anak memiliki pilihan untuk kuliah, tetapi mereka tetap harus mendapatkan peluang kerja yang sesuai dengan keterampilan yang dimiliki.

"Mungkin tidak semuanya punya pilihan kuliah, tapi punya pilihan bekerja. Ketika dia bekerja, negara harus menyiapkan kesempatan kerja dan meningkatkan skill mereka," ujar Reni. Reni juga menekankan

pentingnya dukungan negara bagi anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi tetapi terkendala biaya.

"Kalau keluarganya mampu, mereka bisa membina sendiri. Tapi jika keluarga tidak mampu, pemerintah harus hadir membiayai. Partisipasi untuk pendidikan tinggi harus ditingkatkan jika kita ingin menuju Indonesia Emas 2045," tambahnya.

Dalam pernyataannya, Reni menggarisbawahi peran penting pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan gizi anak-anak. "Gizinya harus berkualitas, pendidikannya juga berkualitas.

Negara harus hadir dalam kebijakan yang lebih luas, bukan hanya di daerah, tetapi juga di tingkat nasional."

Reni juga menyampaikan ide tentang perlunya penghargaan bagi pemerintah daerah yang berhasil meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi.

"Belum ada apresiasi atau penghargaan kepada daerah yang partisipasi pendidikan tingginya tinggi. Ini bisa menjadi langkah untuk mendorong daerah berkontribusi lebih dalam pendidikan, bersama dengan pemerintah pusat melalui kebijakan dan undang-undang," jelasnya.

Sebagai langkah strategis, Reni berharap kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat menciptakan peluang bagi anak-anak untuk terlibat dalam aktivitas produktif, baik bekerja maupun belajar.

"Tingkat pengangguran bisa ditekan, kriminalitas remaja juga bisa dikurangi dengan menyediakan aktivitas kerja atau belajar bagi mereka."

Ia juga menyatakan keprihatinannya terhadap tingginya tingkat pengangguran di kalangan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

"Pengangguran tertinggi itu justru ada di SMK, dan kita semua tentu sedih melihat banyak anak terdidik yang akhirnya menganggur. Inilah yang harus kita atasi bersama," tutup Reni.



"Belum ada apresiasi atau penghargaan kepada daerah yang partisipasi pendidikan tingginya tinggi. Ini bisa menjadi langkah untuk mendorong daerah berkontribusi lebih dalam pendidikan, bersama dengan pemerintah pusat melalui kebijakan dan undang-undang,"

RENI ASTUTI, S.Si., M.PSDM.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Jawa Timur I

Setahun Genosida, Sukamta: Terus Dukung Palestina dan Boikot Israel

Jakarta (06/10) — Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta menyampaikan keprihatinan mendalam dan kecaman keras terhadap krisis kemanusiaan yang terus berlangsung di Palestina, satu tahun setelah serangan besar-besaran Israel.

Konflik ini, imbuh Sukamta, telah menelan banyak korban jiwa, terutama di kalangan warga sipil, serta menghancurkan infrastruktur dasar di Gaza, semakin memperparah kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut.

"Setahun telah berlalu, namun penderitaan rakyat Palestina belum berakhir. Lebih dari 60.000 warga Palestina, termasuk wanita dan anak-anak, telah menjadi korban kebiadaban yang tak berperi kemanusiaan. Penghancuran rumah sakit, sekolah, dan fasilitas publik lainnya adalah pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan harus dipertanggungjawabkan," ujar

Sukamta, merujuk pada laporan terbaru dari UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA, 2024).

Sukamta menegaskan bahwa tindakan Israel ini merupakan pelanggaran hukum internasional dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang yang layak diinvestigasi oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

"Amnesty International dan Human Rights Watch juga telah mengecam keras serangan yang menargetkan warga sipil serta infrastruktur sipil di Gaza," tegasnya.

Sukamta mengapresiasi semakin meningkatnya dukung-

an global terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina.

"Dalam setahun terakhir, kita melihat perubahan signifikan dalam opini dunia. Dukungan untuk kemerdekaan Palestina terus tumbuh, terutama di Eropa, yang kini semakin menyadari pentingnya penegakan hak asasi manusia di Palestina," lanjutnya, mengacu pada laporan dari Brookings Institution (2024) dan Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri (ECFR).

PKS juga mendukung penuh gerakan Boycott, Divestment, Sanctions (BDS) yang menyerukan aksi boikot terhadap Israel, sebagai bentuk solidaritas internasional untuk melawan tindakan keji Israel.

Mengakhiri pernyataannya, Sukamta menyerukan kepada komunitas internasional untuk segera mengambil langkah nyata guna mengakhiri penderitaan rakyat Palestina.

"Kita tidak bisa hanya diam. Dunia harus bersatu untuk menuntut keadilan dan menghentikan genosida ini. PBB harus memimpin upaya diplomatik yang lebih kuat untuk mencapai perdamaian dan memberikan perlindungan kepada rakyat Palestina," tutupnya.

Fraksi PKS berkomitmen untuk terus memperjuangkan keadilan bagi rakyat Palestina dan mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil peran lebih aktif dalam upaya



“Kita tidak bisa hanya diam. Dunia harus bersatu untuk menuntut keadilan dan menghentikan genosida ini. PBB harus memimpin upaya diplomatik yang lebih kuat untuk mencapai perdamaian dan memberikan perlindungan kepada rakyat Palestina.”

H. SUKAMTA, Ph.D

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Di Yogyakarta

internasional untuk menyelesaikan krisis ini.

DPR RI: Jangan Hanya Tuntut Integritas Tapi Perhatikan Isi Tas Hakim

Jakarta (09/10) — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Nasir Djamil mengimbau agar pemerintahan Joko Widodo merespons adanya desakan dari para hakim yang menuntut kenaikan gaji, terutama dalam mengantisipasi adanya aksi cuti bersama hakim se-Indonesia, pada Senin (7/10/2024).

la pun mengapresiasi rencana tersebut sebagai bagian dari penuntutan hak, terlebih untuk meningkatkan kesejahteraan para hakim sebagai gerbang utama dalam proses peradilan negeri ini.

“Aksi mendesak kenaikan gaji dengan cuti bersama oleh hakim itu hal yang wajar dan pemerintah harus meresponsnya agar peradilan di negeri ini berjalan seperti biasanya dan tidak merugikan rakyat lainnya,” kata Nasir saat dihubungi INDOPOS.CO.ID & INDOPOSCO, Minggu (6/10/2024).

la menegaskan, potret peradilan di negeri ini masih kelam, mengingat masih banyak ditemui berbagai kasus suap yang dilakukan oleh para hakim.

“Jangan hanya menuntut integritas dari para hakim, tetapi perhatikan juga isi tas (kesejahteraan) mereka. Kalau tidak seimbang, maka dikhawatirkan akan mengambil isi tas lain, sehingga masuk dalam lingkaran mafia peradilan,” cetusnya.

Nasir pun mengungkapkan, sebenarnya DPR RI periode 2019-2024, khususnya Komisi III selaku yang membidangi hukum sudah menginisiasi adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim, namun usulan legislasi ini tidak direspons oleh pemerintahan Joko Widodo.

“Kami menilai pemerintahan Jokowi ini memang terkesan setengah hati membica-

rakan kesejahteraan hakim. Di mana RUU Jabatan Hakim yang merupakan inisiatif DPR periode kemarin belum ditanggapi pemerintah dengan alasan anggaran,” jelas Nasir, yang merupakan mantan anggota Komisi III DPR RI periode 2019-2024.

Untuk itu, Nasir yang terpilih kembali menjadi anggota DPR periode 2024-2029, mengharapkan RUU Jabatan Hakim ini bisa diteruskan oleh Pemerintahan Prabowo Subianto.

“Terkait RUU Jabatan Hakim yang didalamnya juga membicarakan terkait kesejahteraan hakim harus disahkan sebagai undang-undang. Ini menjadi PR (pekerjaan rumah) bagi pemerintahan Prabowo nanti mengingat pemerintahan Jokowi sudah akan berakhir,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) Yasardin mengkonfirmasi pihaknya bakal menggelar audiensi dengan Mahkamah Agung pada 7 Oktober mendatang.

“Ya insya Allah betul,” ujarnya, saat dikonfirmasi.

Hal senada dikatakan Juru Bicara Gerakan Solidaritas



“Kami menilai pemerintahan Jokowi ini memang terkesan setengah hati membicarakan kesejahteraan hakim. Di mana RUU Jabatan Hakim yang merupakan inisiatif DPR periode kemarin belum ditanggapi pemerintah dengan alasan anggaran,”

Dr. H.M. NASIR DJAMIL, M.Si

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Nangroe Aceh Darussalam II

Hakim Indonesia, Fauzan Arrasyid yang menyebut ribuan hakim di pengadilan seluruh Indonesia akan melakukan cuti bersama selama lima hari pada 7-11 Oktober 2024.

Cuti bersama hakim ini menjadi bentuk protes karena pemerintah dinilai belum

memprioritaskan kesejahteraan hakim selama 12 tahun.

Fauzan mengatakan, gaji dan tunjangan jabatan hakim yang saat ini masih berlaku mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012.



Aleg PKS: Digitalisasi Administrasi Pilkada Tingkatkan Akurasi Data Pemilih

Jakarta (10/10) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Abdul Kharis Almasyhari menilai digitalisasi administrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dapat meningkatkan akurasi data pemilih dengan mengurangi keberulangan data (data redundant).

Hal itu ia sampaikan dalam webinar bertajuk, 'Digitalisasi Pilkada: Tantangan dan Peluang bagi Demokrasi', Selasa, di Jakarta, (08/10/2024).

"Digitalisasi menghindarkan kita dari data redundant, data pengulangan, karena bisa

"Digitalisasi menghindarkan kita dari data redundant, data pengulangan, karena bisa disortir sedemikian rupa, sehingga data pemilih itu bisa akurat,"

Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah V

disortir sedemikian rupa, sehingga data pemilih itu bisa akurat," ujar Kharis di Jakarta, Rabu (09/10/2024).

Selain mencegah terjadinya data ganda, Wakil Ketua Komisi I DPR RI periode 2019-2024 itu mengatakan digitalisasi administrasi juga mencegah seorang pemilih mencoblos dua atau tiga kali. Ia meyakini digitalisasi administrasi Pilkada 2024 dapat mendukung hasil pemilihan menjadi lebih akurat.

"Digitalisasi pilkada ini berdampak pada tingkat atau kualitas pilkada," kata Politisi Fraksi PKS ini.

Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum RI, Badan Pengawas Pemilu RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI menyetujui rancangan Peraturan KPU yang turut mengatur pemakaian Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di Pilkada 202 dalam Rapat dengar pendapat (RDP)

pada Rabu (25/9/2024) lalu.

Pada RDP tersebut, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU RI Idham Holik mengatakan bahwa Sirekap akan digunakan kembali di Pilkada 2024. Ia juga menegaskan bahwa KPU bersama pengembang sudah melakukan perbaikan yang sangat signifikan dari sisi sistem komputasi.

Selain itu, dia menyebut simulasi pemakaian Sirekap telah dilakukan di dua tempat, yakni Kota Depok, Jawa Barat, dan Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.

Lebih lanjut, Idham menjelaskan bahwa data yang ditampilkan dalam Sirekap adalah formulir yang dihasilkan oleh penyelenggara secara berjenjang, seperti Model C.Hasil, Model D.Hasil-KWK, dan seterusnya.

Pada kesempatan itu, dia juga mengatakan bahwa KPU meyakini kasus Sirekap pada Pemilu 2024 tidak terulang kembali di Pilkada 2024.

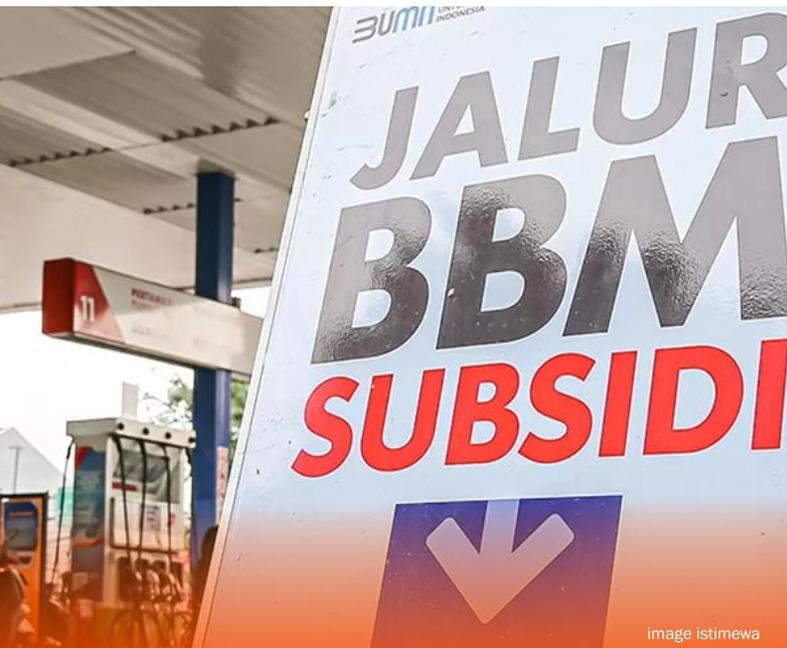


image istimewa

Apresiasi Pembatalan Pembatasan Subsidi BBM, Amin Ak: Daya Beli Rakyat Sedang Terpuruk

Jakarta (04/10) -- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak menilai, penundaan pembatasan subsidi BBM merupakan langkah yang sangat tepat. Dengan kondisi ekonomi global dan nasional saat ini yang sedang menghadapi ketidakpastian, pembatasan subsidi BBM bisa memperburuk situasi karena akan meningkatkan biaya hidup dan menurunkan daya beli masyarakat.

Berbagai indikator ekonomi saat ini sudah menunjukkan adanya pelemahan daya beli masyarakat. Jika ditambah dengan pencabutan subsidi BBM maupun tarif Commuter Line, maka penurunan daya beli akan semakin dslam.

"Deflasi yang terjadi 5 bulan berturut-turut ditengah cukup pasokan barang kebutuhan pokok, menunjukkan penurunan daya beli," ungkap Amin.

Banyaknya pengangguran dan pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi salah satu faktor dari melemahnya daya beli yang berujung pada melandainya permintaan barang dan deflasi.

Lebih lanjut Wakil Rakyat dari Dapil Jatim IV (Kabupaten Jember dan Lumajang) itu mengingatkan, pencabutan subsidi BBM akan memiliki multiplier effect atau efek berantai.

Harga BBM naik akan menyebabkan kenaikan biaya

angkutan atau transportasi sehingga mendorong naiknya harga barang kebutuhan pokok dan harga serta biaya lainnya.

Banyak masyarakat yang masih bergantung pada subsidi BBM untuk kebutuhan sehari-hari. Pembatasan subsidi bisa berdampak negatif pada kelompok masyarakat yang paling rentan.

"Semakin lemahnya daya beli rakyat juga berdampak bagi keberlangsungan pelaku usaha terutama UMKM. Saat ini saja, produk atau barang jualan mereka sulit laku, apalagi kalau daya beli makin terpuruk," tegasnya.

Penundaan pembatasan subsidi BBM memberikan waktu bagi pemerintah untuk mencari solusi yang lebih adil.

Pembatasan subsidi BBM bisa memicu ketidakpuasan dan protes dari masyarakat.

Apresiasi Pembatalan Pembatasan Subsidi BBM, Amin Ak: Daya Beli Rakyat Sedang Terpuruk

« SEBELUMNYA

Dengan menunda kebijakan ini, pemerintah berusaha menjaga stabilitas sosial.

Selain itu, penundaan memberikan waktu bagi pemerintah untuk mempersiapkan infrastruktur dan sistem yang lebih baik untuk memastikan subsidi BBM tepat sasaran. Ini termasuk penggunaan teknologi untuk memantau dan mengontrol distribusi BBM subsidi.

Selama ini, disinyalir masih banyak sektor industri dan perkebunan yang menggunakan BBM bersubsidi. Kebocoran seperti ini disinyalir sudah berlangsung bertahun-tahun dan nyaris tidak berhasil dibersihkan.

Penundaan pembatasan subsidi BBM memungkinkan pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang lebih matang dan komprehensif, yang mempertimbangkan berbagai aspek

ekonomi, sosial, dan politik.

Pemanfaatan sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan hidroelektrik dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan lebih ramah lingkungan.

Selain itu, biofuel yang dihasilkan dari bahan organik seperti tanaman dan limbah menjadi alternatif yang lebih berkelanjutan dibandingkan bahan bakar fosil.

"Indonesia perlu segera menyusun peta jalan terpadu untuk memastikan pelaksanaan biodiesel yang efektif," desaknya.

Di samping itu, diperlukan tata kelola kelapa sawit berkelanjutan melalui intensifikasi, transparansi, dan ketertelusuran, serta peningkatan kesejahteraan petani.

Hilirisasi dan pengembangan biofuel generasi kedua juga penting untuk menjaga ketahanan energi nasional.

"Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas transportasi umum dapat mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi, sehingga konsumsi bahan bakar fosil bisa berkurang secara signifikan," Pungkasnya.



Banyak masyarakat yang masih bergantung pada subsidi BBM untuk kebutuhan sehari-hari. Pembatasan subsidi bisa berdampak negatif pada kelompok masyarakat yang paling rentan. Semakin lemahnya daya beli rakyat juga berdampak bagi keberlangsungan pelaku usaha terutama UMKM. Saat ini saja, produk atau barang jualan mereka sulit laku, apalagi kalau daya beli makin terpuruk,"

AMIN AK, M.M.Anggota Fraksi PKS DPR RI
Dapil Jawa Timur IV

Jelang Pilkada Serentak 2024, Nevi Zuairina : Wujudkan Pilkada Damai dan Demokrasi Bermartabat

Padang (29/09) --- Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina menegaskan pentingnya mewujudkan Pilkada damai sebagai bagian dari proses demokrasi yang semakin matang di Indonesia.

Pilkada serentak yang akan berlangsung pada 27 November 2024 adalah kesempatan bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin daerah yang akan membawa perubahan dan kemajuan.

Menurut Nevi, Pilkada bukan hanya ajang perebutan kekuasaan, tetapi juga wahana pendidikan politik bagi masyarakat, di mana nilai-nilai damai, adil, dan demokratis harus dijaga.

Politisi PKS ini menyoroti tradisi demokrasi di Sumatera Barat yang kuat, di mana masyarakat Minangkabau terkenal dengan budaya masyarakat dan mafakat. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap mengedepankan nilai-nilai ini

dalam pelaksanaan Pilkada.

"Perbedaan pandangan politik hendaknya tidak memecah belah, tetapi menjadi bagian dari dinamika demokrasi yang sehat," ungkapnya.

Lebih lanjut, legislator sumbar ini menyampaikan pentingnya peran aparat keamanan, tokoh masyarakat, serta penyelenggara pemilu dalam menjaga netralitas dan integritas Pilkada. Ia juga menekankan perlunya upaya bersama untuk menghindari politik uang, kampanye hitam, serta tindakan-tindakan yang dapat merusak tatanan demokrasi. Semua pihak, mulai dari kandidat hingga penyelenggara, diharapkan bersikap sportif dan berkomitmen membangun daerah demi kepentingan

rakyat.

Sebagai Anggota Komisi VI yang bertanggung jawab dalam pengawasan sektor ekonomi, Nevi juga melihat peran penting dunia usaha dalam menjaga stabilitas selama Pilkada. Perekonomian yang stabil, menurutnya, akan menciptakan suasana kondusif yang mendukung berlangsungnya Pilkada damai. Para pelaku usaha diharapkan dapat terus berkontribusi tanpa terganggu oleh dinamika politik yang memecah belah.

Selain itu, Anggota badan Anggaran DPR ini juga mengajak generasi muda Sumatera Barat untuk terlibat aktif dalam proses Pilkada. Menurutnya, anak-anak muda adalah agen perubahan yang penting dalam pembangunan daerah, baik sebagai pemilih maupun penyelenggara. Ia juga mengingatkan pentingnya bijak menggunakan media sosial agar tidak menjadi sarana penyebaran hoaks yang dapat memicu konflik.

Di akhir pernyataannya,



Pilkada bukan hanya ajang perebutan kekuasaan, tetapi juga wahana pendidikan politik bagi masyarakat, di mana nilai-nilai damai, adil, dan demokratis harus dijaga.

Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Komisi VI DPR RI

Nevi Zuairina mengajak seluruh masyarakat Sumatera Barat untuk bersama-sama mewujudkan Pilkada yang damai dan bermartabat. Ia berharap, hasil

Pilkada serentak 2024 akan mencerminkan kehendak rakyat dan membawa Sumatera Barat ke arah yang lebih maju dan sejahtera.



RUU PPRT Diteruskan ke 2024-2029

Aleg PKS : DPR Terpilih Harus Berikan Perhatian Khusus

Jakarta (30/09) --- Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetyani meminta DPR periode 2024 - 2029 memberikan perhatian khusus pada Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) agar dapat segera disahkan.

"Diteruskannya pembahasan RUU PPRT ke periode selanjutnya harus disambut positif untuk mewujudkan perlindungan yang komprehensif kepada para pekerja rumah tangga. RUU PPRT akan masuk ke dalam daftar prioritas program legislasi atau prolegnas pada masa keanggotaan 2024-2029 dan harus segera disahkan," terang Netty, Senin, (30/09).

Netty juga berharap seluruh pihak terlibat serius dalam pengawalan RUU PPRT yang sudah lebih dari 20 tahun terabaikan.

"Pimpinan DPR periode ke depan harus serius memperjuangkan pengesahan RUU PPRT ini sebagai wujud komitmen negara dalam memberikan jaminan perlindungan bagi rakyatnya," kata Netty yang juga terpilih kembali sebagai Anggota DPR RI periode 2024-2029.

Netty meminta agar semua pihak berlapang dada dan mengawal pengesahannya.

"Jangan ada lagi upaya menghalangi pengesahan RUU PPRT. Masyarakat dan

khususnya para pekerja rumah tangga harus terus mengawal pembahasan RUU tersebut."

Wakil Ketua Fraksi PKS ini mengaku sangat menyayangkan belum adanya payung hukum yang kuat bagi para pekerja rumah tangga di Indonesia.

"Sudah saatnya negara hadir dan memberikan perlindungan hukum pada para pekerja rumah tangga yang

jumahnya mencapai 5 jutaan ini. Mereka jelas-jelas memberikan kontribusi dalam proses pembangunan," ungkapnya.

"Kita berharap seluruh anggota dan pimpinan DPR RI terpilih periode 2024-2029 memiliki semangat yang sama dalam menilai pentingnya pengesahan RUU PPRT menjadi UU," katanya.

Sebagai informasi, DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan RUU Mahkamah Konstitusi (MK) untuk diteruskan ke periode selanjutnya 2024-2029 dalam rapat paripurna akhir keanggotaan 2019-2024.v

"Diteruskannya pembahasan RUU PPRT ke periode selanjutnya harus disambut positif untuk mewujudkan perlindungan yang komprehensif kepada para pekerja rumah tangga. RUU PPRT akan masuk ke dalam daftar prioritas program legislasi atau prolegnas pada masa keanggotaan 2024-2029 dan harus segera disahkan,"

**Dr. Hj. NETTY
PRASETYANI, M.Si**

Anggota Komisi IX DPR RI



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Kreatif Atraktif Substantif



Selamat Hari Batik Nasional

2 Oktober 2024

*Jaga dan Lestarikan
Batik sebagai
Budaya Bangsa*

Dr. H. Jazuli Juwaini, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI



@fraksiipksdprri



FKPS DPR RI



fraksipksdprri



@FKPSDPRRI



PKS TV DPR RI



Image : Istimewa

Habib Aboe : Jangan Lupakan Hari Kesaktian Pancasila

Jakarta (30/09) — Dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila, Sekretaris Jenderal DPP PKS, Aboebakar Alhabsyi mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk merenungi kembali makna penting dari peringatan bersejarah ini.

“Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya menjadi pengingat akan keberhasilan bangsa Indonesia dalam mempertahankan ideologi Pancasila, tetapi juga sebagai refleksi atas bahaya laten komunisme yang pernah mengancam keutuhan bangsa” ungkapnya.

“Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya menjadi pengingat akan keberhasilan bangsa Indonesia dalam mempertahankan ideologi Pancasila, tetapi juga sebagai refleksi atas bahaya laten komunisme yang pernah mengancam keutuhan bangsa”

HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI

Anggota Komisi III DPR RI

Aboe Bakar mengingatkan, peristiwa kelam yang berpuncak pada Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI), di mana enam jenderal TNI gugur sebagai korban upaya kudeta.

“Ini menunjukkan bahwa Pancasila menjadi benteng utama dalam melindungi bangsa ini dari pengaruh ideologi asing yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan”, paparnya.

“Peringatan ini sangat penting, terutama bagi generasi muda, untuk memahami bahwa Hari Kesaktian Pancasila adalah momentum bersejarah yang menjadi titik balik dari gerakan G30S/PKI. Kita harus senantiasa waspada terhadap bahaya laten komunisme yang masih bisa muncul dalam bentuk lain”, ujar Aboe Bakar.

Habib Aboe mengingatkan bahwa memahami sejarah ini

adalah langkah penting untuk menjaga keutuhan bangsa dan menumbuhkan rasa nasionalisme serta komitmen untuk tetap menjunjung tinggi Pancasila.

Lebih lanjut Aboe Bakar menegaskan Pancasila sebagai dasar negara adalah pedoman bagi kita semua, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam setiap kebijakan publik.

Menurut Aboe Bakar nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila harus terus diperjuangkan dan dipraktikkan demi mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Mari kita jadikan Hari Kesaktian Pancasila sebagai momen untuk memperkuat persatuan dan meneguhkan komitmen dalam menjaga keutuhan NKRI”, pungkask Aboe Bakar mengakhiri.



Aleg PKS Dorong Kepedulian Nasional pada Hari Kesehatan Mental Sedunia

Jakarta (11/10) — Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia yang jatuh setiap 10 Oktober, Anggota DPR RI, Alifudin menyerukan peningkatan kesadaran nasional akan pentingnya kesehatan mental.

Dalam pesannya, Alifudin menekankan bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik, dan bahwa upaya pencegahan serta pengobatan terkait kesehatan mental harus menjadi prioritas dalam sistem kesehatan Indonesia.

“Kesehatan mental adalah aspek penting dari kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Tanpa kesehatan mental yang baik, kita tidak bisa sepenuhnya produktif dan berkontribusi pada pembangunan bangsa,”

H. ALIFUDIN, S.E., M.M.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Kalimantan Barat I

“Kesehatan mental adalah aspek penting dari kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Tanpa kesehatan mental yang baik, kita tidak bisa sepenuhnya produktif dan berkontribusi pada pembangunan bangsa,” ujar Alifudin.

Alifudin mengajak masyarakat untuk lebih terbuka membicarakan kesehatan mental serta mendukung orang-orang yang mengalami masalah kesehatan mental.

“Tidak ada yang perlu malu untuk mencari bantuan terkait kesehatan mental. Dukungan sosial dari keluarga, teman, dan lingkungan sekitar sangat penting dalam pemulihan mereka yang mengalami gangguan kesehatan mental,” jelasnya.

Alifudin juga mengapresiasi langkah pemerintah melalui Kementerian Kesehatan yang

telah mulai memberikan perhatian lebih pada layanan kesehatan mental, seperti meningkatkan akses ke layanan psikologis dan psikiatris di fasilitas kesehatan. Namun, Alifudin menegaskan bahwa masih banyak yang harus dilakukan, terutama dalam penyediaan tenaga profesional dan program pencegahan.

Alifudin berkomitmen untuk terus mendorong kebijakan yang mendukung kesehatan mental, termasuk penambahan anggaran untuk layanan kesehatan mental di Puskesmas dan rumah sakit.

“Saya akan memastikan bahwa perhatian lebih diberikan kepada aspek kesehatan mental, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, remaja, dan lansia. Pemerintah juga harus lebih banyak mengalokasikan sumber daya untuk mengatasi masalah ini,” tutupnya.



Dirgahayu ke-79 TNI, Aleg PKS: Benteng Kedaulatan dan Keamanan Bangsa

Bekasi (05/10) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Jalal Abdul Nasir menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi tinggi kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang merayakan HUT ke-79 hari ini.

Dalam pernyataannya, pria yang akrab disapa Haji Jalal menegaskan pentingnya peran TNI sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara, keamanan, dan keutuhan wilayah Indonesia.

"Selama 79 tahun, TNI telah menjadi benteng

"Selama 79 tahun, TNI telah menjadi benteng kedaulatan bangsa, mengawal dan melindungi negeri ini dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri, TNI bukan hanya pasukan bersenjata, tetapi juga penjaga harmoni sosial yang selalu siap membantu rakyat dalam berbagai kondisi darurat,"

H. JALAL ABDUL NASIR, Ak.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VII

kedaulatan bangsa, mengawal dan melindungi negeri ini dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri," ujar Haji Jalal.

Ia juga menyoroti peran TNI dalam berbagai operasi kemanusiaan dan bencana alam, serta kerja sama yang erat dengan masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial dan politik.

"TNI bukan hanya pasukan bersenjata, tetapi juga penjaga harmoni sosial yang selalu siap membantu rakyat dalam berbagai kondisi darurat," tambah Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VII (Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta).

Sebagai Anggota DPR yang mewakili wilayah Bekasi,

Karawang, dan Purwakarta, Haji Jalal menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan TNI untuk menjaga ketahanan nasional.

"Dalam era modern yang penuh tantangan global, kita semua harus bergandengan tangan memperkuat persatuan dan kesatuan. TNI menjadi pilar utama dalam hal ini," ungkapnya.

Haji Jalal berharap TNI terus meningkatkan profesionalismenya dalam menghadapi tantangan masa depan.

"Dirgahayu TNI ke-79, semoga TNI semakin jaya dan terus menjadi kebanggaan seluruh rakyat Indonesia," tutupnya.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Kreatif Atraktif Substantif

Selamat & Apresiasi

H. Ahmad Syaikh

Atas raihan detikcom Awards 2024
Sebagai "Pendorong Demokrasi
Berintegritas"

Terima kasih atas dedikasi dan upaya
dalam memperkuat demokrasi di
Indonesia. Semoga terus menjadi
inspirasi bagi bangsa!





Temui Rakyat Pasca Dilantik, Yanuar Arif Tak Kuasa Menahan Haru

Purwokerto (06/10) — Anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Yanuar Arif Wibowo tak kuasa menahan tangis, saat bertemu dengan jajaran struktural PKS dan rakyat Banyumas, Sabtu (5/10/2024).

Wakil rakyat yang baru dilantik empat hari lalu ini, langsung memenuhi janjinya untuk bertemu dan menjadi jembatan aspirasi rakyat.

“Ini amanah yang sangat berat buat saya, karena selama saya datang ke Banyumas,

“Ini amanah yang sangat berat buat saya, karena selama saya datang ke Banyumas, seingat saya pada Oktober 2021, mulai kebersamai bapak-ibu sekalian, untuk bersama-sama berjuang. Dan pada akhirnya pada tanggal 1 Oktober kemarin, hari dimana saya berjanji, bersumpah dan sumpah ini harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan Allah SWT.

H. YANUAR ARIF WIBOWO, S.H.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah VIII

seingat saya pada Oktober 2021, mulai kebersamai bapak-ibu sekalian, untuk bersama-sama berjuang. Dan pada akhirnya pada tanggal 1 Oktober kemarin, hari dimana saya berjanji, bersumpah dan sumpah ini harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan Allah SWT. Karena itu saya merasa tidak tenang dan ingin sesegera mungkin datang ke sini bertemu bapak-ibu sekalian”, kata Yanuar terbata-bata.

Pada kesempatan tersebut, Yanuar juga memperlihatkan pin DPR RI yang dikenakannya. Ia mengatakan, pin tersebut merupakan hasil perjuangan semua para pendukungnya.

“Pin ini bukan milik Yanu-

ar, tetapi milik bapak-ibu semua yang sudah kebersamai saya selama ini”, tuturnya.

Kehadiran Wakil Ketua Bidang Kepemudaan DPP PKS ini, mematahkan stigma yang selama ini terbangun, bahwa anggota DPR ketika sudah terpilih akan menghilang dan baru datang kembali kepada rakyat pemilih 5 tahun mendatang.

Yanuar merupakan anggota DPR RI pertama dari Dapil Banyumas-Cilacap dan datang menemui rakyat, setelah dilantik.

“Ini sudah menjadi komitmen saya sejak kampanye dulu, bahwa saya akan datang lagi untuk menjadi jembatan aspirasi rakyat”, ucapnya.



Kunjungi Pondok Pesantren Al Irfaan Bukittinggi, Nevi Dorong Penguatan Pendidikan Berbasis Karakter

Bukittinggi (07/10) — Anggota DPR RI dari Dapil Sumatera Barat II, Nevi Zuairina, melanjutkan komitmennya dalam mendukung pendidikan berbasis keislaman dengan melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren Al Irfaan di Bukittinggi.

Kunjungan ini bertujuan untuk mendengar aspirasi serta memberikan dukungan kepada pesantren yang menjadi salah satu pilar penting dalam membina karakter generasi muda Sumatera Barat.

Dalam kunjungan tersebut, politisi PKS ini disambut hangat oleh pimpinan pondok pesantren beserta santri-santri. Beliau menekankan pentingnya pendidikan agama yang kuat sebagai landasan utama untuk membentuk generasi yang berakhlak mulia.

"Pondok pesantren memiliki peran strategis dalam menjaga moral bangsa. Dengan pendidikan yang berakar pada nilai-nilai Islam, kita bisa menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kekuatan moral dan spiritual yang kokoh," ujar Nevi.

Anggota DPR RI yang duduk di periode kedua ini juga mengapresiasi peran pesantren yang selama ini terus konsisten dalam mengembangkan program-program pendidikan berkualitas meskipun di tengah berbagai tantangan.

Nevi menegaskan bahwa pemerintah perlu terus memberikan perhatian lebih kepada pondok pesantren, baik dari segi sarana maupun prasarana, guna memastikan proses pendidikan berjalan optimal.

Selain itu, Nevi juga memberikan bantuan alakadarnya untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di pesantren.

"Sebagai wakil rakyat, Saya berkomitmen untuk memperjuangkan kebijakan

yang mendukung pengembangan pesantren, termasuk melalui Undang-Undang Pesantren. Kita akan terus mendorong implementasi kebijakan yang lebih proaktif untuk memastikan pesantren mendapatkan perhatian yang layak, baik dari sisi anggaran maupun kebijakan, agar peran pesantren dalam membangun generasi bangsa bisa lebih maksimal," tambahnya.

Kunjungan ini diakhiri dengan doa dan foto bersama dan sesi dialog antara Nevi Zuairina dengan para pengajar dan santri Pondok Pesantren Al Irfaan, di mana mereka mengharapkan agar hubungan yang baik antara pesantren dan pemerintah terus terjalin untuk kemajuan pendidikan Islami di Sumatera Barat.

"Sebagai wakil rakyat, Saya berkomitmen untuk memperjuangkan kebijakan yang mendukung pengembangan pesantren, termasuk melalui Undang-Undang Pesantren. Kita akan terus mendorong implementasi kebijakan yang lebih proaktif untuk memastikan pesantren mendapatkan perhatian yang layak, baik dari sisi anggaran maupun kebijakan, agar peran pesantren dalam membangun generasi bangsa bisa lebih maksimal,"

Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Barat II



Turun ke Dapil, Muh. Haris Beri Semangat Kader PKS Menangkan Paslon Sinoeng- Budi

Kabupaten Semarang (05/10) --- Anggota DPR RI dari Dapil Jateng 1, Muh. Haris, memberikan semangat ratusan kader DPC PKS Kecamatan Argomulyo, Sabtu (05/10/2024) saat kunjungan ke dapil usai dilantik 4 hari lalu.

Kegiatan yang dilaksanakan di kediaman Anggota DPRD Kota Salatiga, Agus Warsito ini dihadiri pula oleh pasangan calon walikota dan wakil walikota yang diusung PKS, Sinoeng-Budi. Selain itu, Ketua DPD PKS Kota Salatiga, Latif Nahari hadir membersamai.

Anggota DPR RI, Muh. Haris mengatakan bahwa seluruh mesin partai PKS harus digerakkan secara totalitas untuk memenangkan Paslon Sinoeng-Budi. Kemenangan yang diharapkan tentu akan menjaga keberlanjutan pembangunan Kota Salatiga setelah 10 tahun dipimpinnya sebagai wakil walikota. Tidak hanya itu, kemenangan pada Pilkada 2024 nanti juga akan mempertahankan tradisi baik PKS yang berhasil mengantarkan kader PKS sendiri menjadi pemimpin di Kota Salatiga.

"Sinoeng-Budi harus menang agar menjaga kontinuitas proses pembangunan di Kota Salatiga. Kemenangan Sinoeng-Budi pada Pilkada 27 November 2024 nanti akan

mempertahankan tradisi kemenangan yang diraih PKS pada Pilkada 2011 dan 2017," tegas Muh. Haris.

Muh. Haris meyakini bahwa pasangan Sinoeng-Budi merupakan orang-orang yang telah berpengalaman di pemerintahan dan legislatif. Sinoeng pernah memimpin Kota Salatiga sebagai penjabat Walikota. Sedangkan Budi Santoso pernah tiga periode mengemban amanah sebagai Anggota DPRD Kota Salatiga.

"Pasangan calon yang kita usung adalah orang-orang yang terbaik. Pak Sinoeng sudah

berpengalaman memimpin Kota Salatiga sebagai penjabat Walikota. Pak Budi juga sudah tiga periode menjadi Anggota DPRD Kota Salatiga. Insyaallah, mereka berdua bisa melanjutkan Kota Salatiga semakin berprestasi," kata Muh. Haris.

Ketua DPD PKS Kota Salatiga, Latif Nahari menyampaikan perihal peluang besarnya kemenangan yang bakal diraih oleh Sinoeng-Budi. Berdasarkan kinerja dan survei paslon Sinoeng-Budi mengungguli dua paslon lain.

"Paslon Sinoeng-Budi memiliki peluang menang yang besar. Bahkan dari survei-survei yang ada, paslon yang diusung PKS ini unggul dari paslon lain. Maka kita semua harus optimis akan memenangkan Pilkada 2024 ini," pungkas Latif Nahari yang juga Anggota DPRD Kota Salatiga.

"Pasangan calon yang kita usung adalah orang-orang yang terbaik. Pak Sinoeng sudah berpengalaman memimpin Kota Salatiga sebagai penjabat Walikota. Pak Budi juga sudah tiga periode menjadi Anggota DPRD Kota Salatiga. Insyaallah, mereka berdua bisa melanjutkan Kota Salatiga semakin berprestasi,"

Dr. H. MUH. HARIS, S.S., M.Si.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah I



Reni Astuti Apresiasi Kota Surabaya Raih Kota Terbaik Pertama di SDGs Action Award 2024

Surabaya (10/10) — Kota Surabaya berhasil meraih prestasi gemilang dengan dinobatkan sebagai Kota Terbaik Pertama dalam ajang SDGs Action Award 2024 yang diselenggarakan oleh Bappenas RI di Jakarta.

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan berdampak positif bagi masyarakat.

Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

“Penghargaan ini adalah bukti nyata dari komitmen dan kerja keras semua pihak di Kota Surabaya dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,”

RENI ASTUTI, S.Si., M.PSDM.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Jawa Timur I

dari Daerah Pemilihan Jawa Timur 1, Reni Astuti memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh elemen di Kota Surabaya atas prestasi yang diraih.

“Penghargaan ini adalah bukti nyata dari komitmen dan kerja keras semua pihak di Kota Surabaya dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujar Reni.

Sebagai wakil rakyat dari dapil Surabaya, Reni merasa bangga dengan pencapaian ini dan optimis bahwa Surabaya akan terus menjadi inspirasi bagi kota-kota lain di Indonesia.

“Saya bangga bahwa Surabaya mampu menunjukkan hasil yang luar biasa dalam menjalankan agenda SDGs. Ini menjadi dorongan bagi kita semua untuk melanjutkan perjuangan dalam mewujudkan nilai-nilai SDGs di masa depan,” tambahnya.

Reni juga mengajak seluruh elemen, baik pemerintah, legislator, masyarakat, dan seluruh pihak untuk terus bekerja sama dalam mencapai target SDGs 2030.

“Saya yakin, dengan berkelanjutan yang kita bangun bersama, kemajuan dan kesejahteraan seluruh warga Kota Surabaya akan terus meningkat,” ungkapnya penuh harapan.

SDGs Action Award 2024 merupakan ajang penghargaan yang digagas oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas sebagai bentuk apresiasi kepada berbagai pihak yang telah memberikan aksi nyata dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang inklusif.

Penghargaan ini juga menjadi bukti bahwa Surabaya berada di jalur yang tepat dalam mengejar tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan.



Bersama Kemendikbudristek, Fikri Faqih Usulkan Jalur Rempah Jadi Warisan Budaya Dunia

Tegal (11/10) — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Abdul Fikri Faqih bersama Kemendikbudristek RI mengusulkan jalur rempah sebagai warisan budaya dunia.

Kota Tegal di Jawa Tengah sebagai salah satu daerah di Pesisir Utara Jawa yang dilewati sebagai jalur rempah. Hal itu diungkapkan dalam Seminar Kebudayaan Pengaruh Jalur Rempah di Pesisir Utara di Hotel Premiere Tegal, Kamis (10/10).

Legislator PKS asal daerah pemilihan Jateng IX ini mengatakan jalur rempah di pesisir utara Jawa itu meliputi Gresik, Lamongan Tuban, Pati, Demak, Tegal dan Cirebon. Karenanya, perlu upaya untuk melestarikannya sebagai warisan budaya.

Sebab, kata Fikri, rempah itu mempengaruhi semua tradisi, budaya, rasa, dan karya di Indonesia.

"Selain itu, kita ini tahu, bangsa kita juga kuat karena punya jalur rempah. Bahkan, komoditas inilah yang menjadi

salah satu alasan para penjajah datang ke Indonesia," ujarnya.

Menurutnya, tidak semua negara mampu menghasilkan rempah. Di dunia, negara yang memproduksi rempah paling besar yakni dari Brazil, India, China, dan Indonesia.

"Masyarakat harus mengetahui hal ini. Ternyata, rempah ini ternyata mempengaruhi motif batik Lasem dan Salem. Serta mempengaruhi gedung sebagainya," jelasnya.

Fikri menilai, seminar jalur rempah dan rencana memasukannya sebagai warisan budaya ini merupakan upaya untuk melestarikan.

Fikri mengatakan, bangsa Indonesia didatangi oleh para penjajah karena memiliki komoditas rempah yang dibutuhkan oleh masyarakat dunia.

Sementara, Direktur Pem-

binaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan Kemendikbudristek RI, Restu Gunawan mengungkapkan saat ini, jalur rempah sedang diusulkan sebagai warisan budaya dunia kategori route atau jalur.

Karenanya, langkah awal yakni menggelar sosialisasi agar masyarakat paham tentang jalur rempah.

"Kegiatan ini juga upaya untuk mendorong generasi muda punya kebanggaan terhadap warisan budaya Indonesia. Kita datang ke daerah-daerah untuk seminar sosialisasi guna mengedukasi masyarakat, apa itu jalur rempah itu," terangnya.

Restu mengatakan, kegiatan ini juga upaya untuk mendorong generasi muda punya kebanggaan terhadap warisan budaya Indonesia.

"Maka kami datang ke daerah-daerah untuk seminar sosialisasi, macam-macam dilakukan untuk mengedukasi masyarakat, apa itu jalur rempah itu," pungkasnya.



Tidak semua negara mampu menghasilkan rempah. Di dunia, negara yang memproduksi rempah paling besar yakni dari Brazil, India, China, dan Indonesia. Masyarakat harus mengetahui hal ini. Ternyata, rempah ini ternyata mempengaruhi motif batik Lasem dan Salem. Serta mempengaruhi gedung sebagainya,"

Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah IX



Kunjungi Bazar Kuliner Halal di Pemalang, Anggota DPR RI Kenalkan Konsep Ikon Desa

Pemalang (14/10) --- Ruas jalan Gatot Subroto, Kelurahan Purwoharjo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, disulap Yayasan Al Irsyad Al Islamiyah menjadi pusat kuliner.

Sejumlah 50 stan UMKM berjajar di acara Bazar Kuliner Halalan Toyyiban dalam rangka Milad Al Irsyad Al Islamiyah ke 110.

Turut hadir dalam acara itu anggota DPR RI 2024-2029, Rizal Bawazier.

Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia.

"Scara nasional 97 persen tenaga kerjanya dari umkm. Lalu 60,4 persen pendapatan negara dari UMKM," tutur Rizal Bawazier, Minggu 13 Oktober 2024.

RB, sapaan akrabnya, menuturkan bahwa salah satu tujuannya jadi wakil rakyat adalah mengembangkan UMKM.

Ia menyebut salah satu programnya adalah membuat ikon desa untuk mengembangkan UMKM.

"Ikon desa itu misalnya ada desa sapi, desa kambing. Itu nanti kita tentukan supaya jalur untuk pemasarannya mudah. Termasuk di Comal ini yang bisa jadi ikon desanya apa," jelasnya.

Melalui ikon desa, UMKM akan dibina agar menghasilkan produk yang kompetitif dan bisa bersaing secara global.

Rizal Bawazier menyebut perlunya memperkuat UMKM karena saat ini banyak impor-impor ilegal.

"Yang penting produknnya kompetitif, apalagi sekarang banyak impor impor ilegal. Inilah yang kita perjuangkan," ucapnya.

Ia pun yakin bahwa UMKM

akan berkembang seiring dengan rencana dipisahkannya Kemenkop UMKM menjadi kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM.

Ketua panitia acara, Sofiyon Nahdi menyebut bahwa Bazar Kuliner Halalan Toyyiban Al Irsyad Al Islamiyah merupakan even tahunan.

Setiap tahun jumlah peserta makin meningkat, dari 30 hingga saat ini 50 peserta.

"Ada kuliner dan non kuliner. Untuk non kuliner ada Bank Syariah Indonesia (BSI), biro umrah dan sebagainya," jelasnya.

Untuk peserta bazar Kuliner berasal dari warga sekitar Comal dan wali murid sekolah Al Irsyad.

"Ikon desa itu misalnya ada desa sapi, desa kambing. Itu nanti kita tentukan supaya jalur untuk pemasarannya mudah. Termasuk di Comal ini yang bisa jadi ikon desanya apa," jelasnya. Melalui ikon desa, UMKM akan dibina agar menghasilkan produk yang kometitif dan bisa bersaing secara global.

RIZAL BAWAZIER

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah X



Sempat Tertunda, DPR Dorong RUU Jabatan Hakim Diproses di Pemerintahan Prabowo

Jakarta (08/10) --- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Nasir Djamil mengimbau agar pemerintahan Joko Widodo merespons adanya desakan dari para hakim yang menuntut kenaikan gaji, terutama dalam mengantisipasi adanya aksi cuti bersama hakim se-Indonesia, pada Senin (7/10/2024).

Ia pun mengapresiasi rencana tersebut sebagai bagian dari penuntutan hak, terlebih untuk meningkatkan kesejahteraan para hakim sebagai gerbang utama dalam proses peradilan negeri ini.

"Aksi mendesak kenaikan gaji dengan cuti bersama oleh hakim itu hal yang wajar dan pemerintah harus meresponsnya agar peradilan di negeri ini berjalan seperti biasanya dan tidak merugikan rakyat lainnya," kata Nasir saat dihubungi INDOPOS.CO.ID & INDOPOSCO, Minggu (6/10/2024).

Ia menegaskan, potret peradilan di negeri ini masih kelam, mengingat masih banyak ditemui berbagai kasus suap yang dilakukan oleh para hakim.

"Jangan hanya menuntut integritas dari par hakim, tetapi perhatikan juga isi tas (kesejahteraan) mereka. Kalau tidak seimbang, maka dikhawatirkan akan mengambil isi tas lain, sehingga masuk dalam

lingkaran mafia peradilan," cetusnya.

Nasir pun mengungkapkan, sebenarnya DPR RI periode 2019-2024, khususnya Komisi III selaku yang membidangi hukum sudah menginisiasi adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim, namun usulan legislasi ini tidak direspons oleh pemerintahan Joko Widodo.

"Kami menilai pemerintahan Jokowi ini memang

terkesan setengah hati membicarakan kesejahteraan hakim. Di mana RUU Jabatan Hakim yang merupakan inisiatif DPR periode kemarin belum ditanggapi pemerintah dengan alasan anggaran," jelas Nasir, yang merupakan mantan anggota Komisi III DPR RI periode 2019-2024.

Untuk itu, Nasir yang terpilih kembali menjadi anggota DPR periode 2024-2029, mengharapkan RUU Jabatan Hakim ini bisa diteruskan oleh Pemerintahan Prabowo Subianto.

"Terkait RUU Jabatan Hakim yang didalamnya juga membicarakan terkait kesejahteraan hakim harus disahkan sebagai undang-undang. Ini menjadi PR (pekerjaan rumah) bagi pemerintahan Prabowo nanti mengingat pemerintahan Jokowi sudah akan berakhir," pungkasnya.

"Jangan hanya menuntut integritas dari par hakim, tetapi perhatikan juga isi tas (kesejahteraan) mereka. Kalau tidak seimbang, maka dikhawatirkan akan mengambil isi tas lain, sehingga masuk dalam lingkaran mafia peradilan,

H.M. NASIR DJAMIL, M.Si

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Nangroe Aceh Darussalam II



Terima Aspirasi Solidaritas Hakim Indonesia, Fraksi PKS Komitmen Perjuangkan Sejumlah Tuntutan Hakim

Jakarta (09/10) -- Sejumlah Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Achmad Ru'yat, Nasir Djamil, Mardani Ali Sera, Rizal Bawazier dan Yanuar Arif menerima audiensi dari Solidaritas Hakim Indonesia di Ruang Rapat Fraksi PKS DPR RI, Lantai 3, Gedung Nusantara I, Selasa, (08/10/2024).

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Achmad Ru'yat mengatakan pihaknya mendengar, menyimak bahkan mencatat apa yang menjadi aspirasi para Hakim untuk kemudian diperjuangkan agar lebih baik.

"Yang Mulia Wakil Tuhan para Hakim. Seluruh apa yang disampaikan secara objektif oleh para Hakim sudah dicatat untuk menjadi berita acara yang merupakan fakta yang disampaikan kepada pimpinan DPR melalui Fraksi PKS," ungkap Ru'yat.

Kemudian yang kedua, imbunya, Rancangan Undang-undang Jabatan Hakim, Perlindungan Hakim dan juga aspirasi Kesejahteraan Hakim itu sangat ditentukan oleh kesepakatan politik Presiden Republik Indonesia bersama DPR RI secara kolektif kolegial.

"Apa yang dilakukan para Hakim Yang Mulia hadir ke Fraksi PKS ini sangat tepat. Sehingga dalam konteks public policy keinginan yang sangat rasional ini, kita harus terus opinikan dan gelindingkan. Saya

mendukung agar apa yang sudah diutarakan para hakim ini dibukukan sebagai data primer untuk disampaikan pada pembambil keputusan di negeri ini," ungkap Anggota dari Dapil Jawa Barat V ini.

Lebih lanjut Ru'yat menambahkan pihaknya sangat menyambut baik apa yang dilakukan oleh Presiden Terpilih

Prabowo Subianto yang disampaikan melalui sambungan telepon.

"Karena seorang pemimpin itu dilihat dari kejujuran dalam berkata. Kita ingin pemimpin Indonesia ke depan bisa mewujudkan apa yang sudah dijanjikan. Kalau berbicara terkait dengan keuangan itu relatif. Kami sangat mencermati kerja dari proses pengadilan, bagaimana para hakim bekerja siang malam, bagaimana para panitera mengatur jadwal sedemikian rupa, sehingga sebagai pejabat negara sangat layak untuk anggaran negara menyertainya," tutup Wakil Walikota Bogor periode 2009-2014.

"Apa yang dilakukan para Hakim Yang Mulia hadir ke Fraksi PKS ini sangat tepat. Sehingga dalam konteks public policy keinginan yang sangat rasional ini, kita harus terus opinikan dan gelindingkan. Saya mendukung agar apa yang sudah diutarakan para hakim ini dibukukan sebagai data primer untuk disampaikan pada pembambil keputusan di negeri ini,

drh. H. ACHMAD RU'YAT, M.Si.
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat V



image istimewa

Terima Solidaritas Hakim Indonesia, HNW: Prihatin Kondisi Hakim, Negara Harus Penuhi Tuntutan Hakim

Jakarta (08/10) --- Kisruh dunia peradilan di Indonesia menyeruak dengan adanya tuntutan terbuka Hakim dan cuti massal para hakim yang datang ke Jakarta menemui berbagai pihak berkewenangan, salah satu pihak yang mereka temui untuk mengadukan nasib dan mintakan bantuan adalah Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid.

Upaya para hakim menuntut keadilan mengantar delegasi Solidaritas Hakim Indonesia (SHI), bertemu dengan Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Pertemuan berlangsung di Ruang Kerja Wakil Ketua MPR, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Delegasi SHI dipimpin Humaidi, Hakim Pengadilan Agama Prabumulih yang juga Sekretaris Solidaritas Hakim Indonesia.

Kepada Wakil Ketua MPR, Humaidi antara lain menyampaikan apa yang dilakukan SHI merupakan jalan terakhir yang bisa ditempuh setelah bersabar selama 12 tahun. Meski sebenarnya, cuti massal untuk berikhtiyar mendapatkan kesejahteraan yang layak, mestinya tidak mereka lakukan bila ketentuan hukum dan keadilan diberlakukan juga untuk Hakim. Namun, Humaidi

memastikan pihaknya tidak melakukan mogok kerja. Masih banyak hakim di daerah yang tetap bekerja menegakkan hukum bagi penuntut keadilan sebagaimana mestinya.

"Sudah cukup kami bersabar selama 12 tahun, dengan gaji dan fasilitas yang sangat terbatas. Banyak hakim yang terpaksa tinggal di rumah kos sederhana karena tidak sanggup membayar sewa rumah yang lebih layak. Padahal, semestinya hakim sudah selesai dengan kebutuhan dasarnya agar tenang dalam memutuskan perkara. Tetapi yang terjadi jauh dari harapan," ungkap Humaidi.

Bahkan, ungkapnya, dibanding sistem penggajian pada era orde baru, penggajian pada era Reformasi era Negara Hukum, maka sistem penggajian di era Orde baru bahkan jauh lebih baik dari era

Terima Solidaritas Hakim Indonesia, HNW : Prihatin Kondisi Hakim, Negara Harus Penuhi Tuntutan Hakim

« SEBELUMNYA

Reformasi. Yang menyedihkan juga, keputusan MA yg mengabulkan JR terkait penggantian Hakim, juga belum dilaksanakan oleh Pemerintah.

"Saat ini kondisi para hakim sangat memprihatin. Padahal, tugas hakim tidak ringan, setiap hari puluhan perkara harus disidangkan. Sementara pengangkatan para hakim tidak dilakukan tiap tahun seperti halnya PNS. Sehingga menimbulkan sering terjadinya Hakim Tunggal, dengan segala dampaknya, padahal mestinya dilakukan sidang Majelis Hakim".

Menanggapi aduan dan aspirasi para hakim, Hidayat Nur Wahid atau HNW menyatakan prihatin. Ia mendukung upaya para hakim untuk menuntut keadilan guna memperbaiki kinerja dan kesejahteraan. Negara, menurut Hidayat seharusnya menjadi contoh bagi penegakan hukum, termasuk soal ketataan laksanakan putusan yudisial review di MA. Peraturan Pemerintah

Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung yang dikeluhkan para hakim.

"Ini adalah paradok, negara yang seharusnya menjadi contoh untuk mematuhi hukum malah tidak sepenuhnya melaksanakan putusan hukum. Padahal sekarang kita sudah menyatakan diri dalam konstitusi sebagai negara hukum. Sudah semestinya jika hukum menjadi panglima, dan negara berada di garda terdepan menjadi teladan penegakan hukum dan dijadikan hukum sebagai panglima. Penting Pemerintah yang baru dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo memperstihkan serius tuntutan para hakim dengan segera mengabulkan tuntutan mereka, demi tegaknya prinsip Negara Hukum," kata Hidayat Nur wahid.

Karena itu, HNW mengusulkan agar SHI terus bersemangat melakukan upaya-upaya yang lebih strategis. Salah satunya bertemu Komisi

III dan Pimpinan DPR RI, DPD RI, juga hakim senior di MA untuk ikut peduli dengan perjuangan para yuniornya.

"Tolong inti semua masalah itu ditulis dengan baik, dan disampaikan dg benar, agar bisa meyakinkan dan menjadi pegangan bagi Pemerintahan yang baru, DPR maupun MA. Bukan hanya soal kesejahteraan, tetapi juga masalah penegakan hukum dan permasalahan peradilan lainnya yang selama ini dihadapi para hakim.

Tuntutan ini menunjukkan kondisi peradilan kita belum cukup baik," ungkap Hidayat Nur Wahid yang menjanjikan untuk ikut menyampaikan tuntutan mereka ke kawan2 dari FPKS di berbagai komisi terkait di DPR, dan akan menyampaikan aspirasi mereka terkait dg PPHN dan relasinya dg Kekuasaan Kehakiman saat Rapim MPR hari Rabu 9 Oktober 2024.

Dalam penutupnya HNW mendoakan agar Allah mengistiqamahkan para Hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan, dan membukakan matahati Pemerintahan yg baru untuk mengabulkan tuntutan keadilan para Hakim. Dan para Hakim yang menemui HNW mengaminakan dsn menyambut antusias sikap dsn pembelaan HNW.



"Tolong inti semua masalah itu ditulis dengan baik, dan disampaikan dg benar, agar bisa meyakinkan dan menjadi pegangan bagi Pemerintahan yang baru, DPR maupun MA. Bukan hanya soal kesejahteraan, tetapi juga masalah penegakan hukum dan permasalahan peradilan lainnya yang selama ini dihadapi para hakim.

Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta II

Hidayat Nur Wahid Sambut Hangat Kunjungan Yayasan IQRO' Bekasi Cabang Aceh: Dorong Pendidikan Lebih Baik

Jakarta (12/10) — Wakil Ketua MPR RI, Muhammad Hidayat Nur Wahid, menyambut hangat kunjungan kerja Yayasan IQRO' Bekasi Cabang Aceh, yang berlangsung dari 8 hingga 11 Oktober 2024.

Kegiatan ini diadakan di ruang kerja Hidayat Nurwahid dan dihadiri oleh Anggota DPR Fraksi PKS Ghufran Zainal Abidin, dari Daerah Pemilihan Aceh 1.

Kunjungan tersebut dipimpin oleh Verawati, Ketua Yayasan IQRO' Bekasi Cabang Aceh, bersama beberapa pengurus lainnya.

Dalam pertemuan itu, Hidayat Nur Wahid yang juga menjabat sebagai Dewan Pengawas Yayasan IQRO', memberikan arahan terkait peningkatan kualitas pendidikan yang harus terus dijaga.

Dalam sambutannya, Hidayat Nur Wahid menekankan pentingnya menjaga kualitas pendidikan sebagai kunci masa depan bangsa.

"Setiap lembaga pendidik

dikan di bawah Yayasan IQRO' harus berkomitmen untuk mencetak generasi yang cerdas dan berakhlak mulia," tegasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa setiap momen dapat menjadi pelajaran penting bagi kemajuan diri dan lembaga pendidikan.

Hidayat juga mendorong inovasi dalam dunia pendidikan, menekankan bahwa di era yang terus berubah, lembaga pendidikan harus mampu beradaptasi dan berinovasi.

"Inovasi adalah kunci relevansi pendidikan. Jangan ragu untuk mencoba pendekatan baru dalam pembelajaran," ujarnya.

Hidayat Nur Wahid mengingatkan bahwa sinergi

antara sekolah, guru, siswa, dan orang tua merupakan fondasi penting untuk membangun lingkungan pendidikan yang mendukung kemajuan bersama.

Sementara itu, Ghufran Zainal Abidin juga turut memberikan arahan menegaskan pentingnya kunjungan ini sebagai motivasi untuk terus melakukan perbaikan dalam aspek pendidikan.

HNW mendorong Yayasan IQRO' Bekasi Cabang Aceh agar berkomitmen pada perubahan positif yang lebih baik.

"Jadikan kunjungan ini sebagai titik tolak untuk terus melakukan pembaruan dan perbaikan di setiap aspek pendidikan. Kita semua bertanggung jawab untuk membawa perubahan positif," pesannya.

Selain itu, pentingnya menjaga silaturahmi dan membuka komunikasi dengan pihak-pihak yang siap membantu perkembangan lembaga pendidikan juga menjadi poin utama dari nasihat yang disampaikan.



"Setiap lembaga pendidikan di bawah Yayasan IQRO' harus berkomitmen untuk mencetak generasi yang cerdas dan berakhlak mulia,"

Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A

Wakil Ketua MPR RI

Menurut Ghufran, membuka jaringan yang lebih luas akan memperkuat posisi lembaga pendidikan dalam menghadapi tantangan di masa depan. Ketua Yayasan IQRO' Bekasi Cabang Aceh, Verawati, menyampaikan rasa terima kasihnya atas nasihat berharga yang diberikan oleh Hidayat Nur Wahid dan Ghufran Zainal

Abidin. "Kami berkomitmen untuk menerapkan masukan yang diberikan demi kemajuan pendidikan di Aceh," ungkapnya. Kunjungan ini diharapkan menjadi momentum penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Aceh melalui inovasi dan kolaborasi yang berkelanjutan.

PROGRAM UNGGULAN FRAKSI PKS DPR RI



FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Kecatif Atrokiif Substantif



HARI ASPIRASI RAKYAT (Selasa dan Jum'at)

Karpet merah bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada Anggota DPR Fraksi PKS, tanpa sulit dan berbelit. Memperkuat fungsi representasi dan relasi konstituensi yang kokoh di DPR.

Sampaikan aspirasi melalui website fraksi.pks.id



Terpilih Kedua Kalinya, Hamid Noor: Mari Lanjutkan Perjuangan Kepentingan Rakyat

Jakarta (01/10) --- Anggota DPR RI Periode 2024-2029 Fraksi PKS, Hamid Noor Yasin menyebut bakal melanjutkan kepentingan aspirasi rakyat di daerah pemilihannya Jawa Tengah IV yakni Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Wonogiri.

“Kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan pengabdian, pelayanan kepada masyarakat khususnya di dapil dan pada umumnya untuk bangsa dan negara Indonesia,” ungkap Hamid sebelum Pelantikan Anggota DPR Periode 2024-2029 di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa (01/10). Hamid berharap atas

kehadiran dirinya di tengah-tengah masyarakat mampu memberikan kebermanfaatn, kemaslahatan bagi bangsa dan negara.

“Saya harapkan dan cita-cita kami ke depan, sehingga kehadiran kami sebagai anggota DPR RI bisa lebih memberikan kemaslahatan bangsa dan negara serta rakyat Indonesia,” harapnya.

“Kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan pengabdian, pelayanan kepada masyarakat khususnya di dapil dan pada umumnya untuk bangsa dan negara Indonesia,”

Drs. HAMID NOOR YASIN, M.M.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah IV



Skor PISA Terendah, Dokter Gamal: Kita Juga Akan Benahi Kesejahteraan Guru

Jakarta (01/10) --- Anggota DPR RI Periode 2024-2029 Fraksi PKS, Gamal Albinsaid menyoroti skor Programme for International Student Assessment (PISA) Indonesia yang menurutnya terendah sepanjang sejarah.

Berdasarkan data, literasi anak-anak Indonesia bahkan bertenger di peringkat dua dari bawah melalui laporan dari Central Connected State University.

"Pertama saya ingin menjadikan DPR sebagai lembaga yang impact full ya. Jadi sebagai anggota DPR, don't try to impress people, but focus to impact people," jelas Gamal sebelum Pelantikan Anggota DPR Periode 2024-2029 di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa (01/10).

Gamal memiliki kedekatan

isu terkait pendidikan juga kesejahteraan para guru. Kata ia, 42 persen guru di seluruh Indonesia terjerat pinjaman online (pinjol) bahkan 40 persen guru berpenghasilan di bawah Rp.2 juta.

"Oleh karena itu, saya ingin membangun pendidikan kita, memastikan akses kepada pendidikan, kesejahteraan guru bisa terjadi dengan baik dan kualitas pendidikan kita bisa meningkat secara signifikan," tutup aleg daili Jawa Timur (Jatim) V.

42 persen guru di seluruh Indonesia terjerat pinjaman online (pinjol) bahkan 40 persen guru berpenghasilan di bawah Rp.2 juta. Oleh karena itu, saya ingin membangun pendidikan kita, memastikan akses kepada pendidikan, kesejahteraan guru bisa terjadi dengan baik dan kualitas pendidikan kita bisa meningkat secara signifikan,

dr. GAMAL

Anggota Fraksi PKS DPR RI Jawa Timur V



Jakarta (01/10) — Anggota DPR RI Periode 2024-2029 Fraksi PKS, dr. Slamet kembali menjadi Anggota legislatif periode 2024-2029.

Slamet menuturkan masih memiliki fokus terhadap isu kesejahteraan petani dan nelayan, agar nantinya Indonesia bisa mandiri pangan.

“Mudah-mudahan masih diamanahkan di Komisi empat sehingga saya masih semangat untuk meneruskan perjuangan saya kemarin,” capak Slamet sebelum Pelantikan Anggota DPR Periode 2024-2029 di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa (01/10).

“Tidak akan tercapai kecuali petani dan nelayan kita sejahtera. Itu yang akan saya perjuangkan,” turut ia.

“Mudah-mudahan masih diamanahkan di Komisi empat sehingga saya masih semangat untuk meneruskan perjuangan saya kemarin,”

drh. H. SLAMET

Anggota Fraksi PKS DPR RI
Dapil Jawa Barat IV

**Bersyukur Terpilih Kembali, Slamet:
Fokus Pada Kemandirian Pangan
agar Masyarakat Berdaulat**



Terpilih sebagai Wakil Rakyat, Hendry Munief Serukan Kesejahteraan Masyarakat Lewat UMKM

Jakarta (01/10) --- Anggota DPR RI Periode 2024-2029 Fraksi PKS, Hendry Munief menyerukan misi kesejahteraan masyarakat Riau melalui program pembinaan UMKM saat menjadi anggota parlemen terpilih.

"Saya Hendry Munief, anggota DPR RI terpilih 2024-2029 dari dapil Riau I. Alhamdulillah kita melihat suasana hari ini dalam proses pelantikan tanggal 1 Oktober ini. Kita melihat ada banyak hal yang bisa kita perjuangkan," ucap Hendry sebelum Pelantikan Anggota DPR Periode 2024-2029 di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa (01/10).

Hendry menambahkan hari ini dilantik sebagai anggota DPR RI ingin memperjuangkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Provinsi Riau.

Menurut Hendy, sebenarnya tugas negara itu hanya ada dua. Pertama ialah memastikan setiap orang itu tidak ada yang lapar, dalam arti kesejahteraannya meningkat.

"Yang kedua adalah keamanan dan juga keadilan. Jadi merasakan keamanan dan tegaknya keadilan. Ini yang berangkali yang sebagai mana nama dari PKS, yaitu Partai Keadilan Sejahtera, tegaknya keadilan dan kesejahteraan," sambungnya.

sebenarnya tugas negara itu hanya ada dua. Pertama ialah memastikan setiap orang itu tidak ada yang lapar, dalam arti kesejahteraannya meningkat. Yang kedua adalah keamanan dan juga keadilan. Jadi merasakan keamanan dan tegaknya keadilan.

H. HENDRY MUNIEF, M.B.A.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Riau I

Adang Daradjatun Tegaskan Komitmen Wakil Rakyat untuk DPR RI Periode 2024-2029

Jakarta (01/10) — Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Adang Daradjatun, hari ini telah resmi dilantik untuk periode 2024-2029.

Dalam pernyataannya setelah pelantikan, Adang menyampaikan komitmen untuk terus memperjuangkan kepentingan rakyat dan menjalankan amanah sebagai wakil rakyat dengan penuh tanggung jawab.

Hal itu disampaikan Adang sebelum Pelantikan Anggota DPR Periode 2024-2029 di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa (01/10).

“Visi dan misi kita sederhana, namun penting, yaitu memastikan bahwa segala yang kita lakukan adalah untuk kepentingan rakyat. Sebagai anggota dewan, tugas utama saya adalah mengawasi visi-misi pemerintah yang akan berjalan serta mengawal pelaksanaan tugas konstitusional DPR, yaitu pembentukan undang-undang,

pengawasan anggaran, dan pengawasan terhadap mitra-mitra kerja pemerintah,” ungkap Adang.

Sebagai anggota DPR yang kembali terpilih, Adang menegaskan bahwa peran DPR sangat penting dalam memastikan pemerintah menjalankan tugasnya sesuai dengan konstitusi dan aspirasi rakyat.

“Kami bertanggung jawab untuk memastikan bahwa visi-misi pemerintahan yang sedang berjalan sesuai dengan janji kepada rakyat. DPR juga memiliki peran vital dalam memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Dalam melaksanakan tugasnya di parlemen, Adeg

PKS Dapil DKI Jakarta III itu juga berkomitmen untuk terlibat aktif dalam pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Lebih lanjut, Adang menegaskan pentingnya penggunaan anggaran yang transparan dan akuntabel, serta memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dapat memberi manfaat langsung bagi rakyat.

Sebagai Wakil Rakyat, Politikus PKS yang telah resmi dilantik hari ini tersebut menekankan bahwa semua langkahnya di DPR adalah untuk menyalurkan dan memperjuangkan suara rakyat.

Menurutnya, Anggota Dewan tidak hanya bertugas dalam membuat undang-undang, tetapi juga memastikan bahwa undang-undang tersebut menjawab kebutuhan masyarakat.

“Setiap undang-undang yang dibahas harus mencerminkan aspirasi rakyat. Kami juga terus mengawasi implementasi kebijakan dan memastikan kementerian-kementerian menjalankan tugasnya dengan baik. Tugas kita adalah menjaga agar setiap kebijakan berpihak pada kepentingan rakyat,” tegas Adang.

Terakhir, menyampaikan harapannya agar selama lima tahun ke depan, dirinya dapat terus mengemban amanah dengan baik. Ia berjanji akan bekerja keras demi memastikan



“Kami bertanggung jawab untuk memastikan bahwa visi-misi pemerintahan yang sedang berjalan sesuai dengan janji kepada rakyat. DPR juga memiliki peran vital dalam memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat,”

Drs. H. ADANG DARADJATUN

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta II

setiap kebijakan pemerintah tetap berlandaskan kepentingan rakyat dan membawa perubahan yang positif.

“Amanah ini adalah tanggung jawab yang besar.

Saya berharap dapat terus memperjuangkan aspirasi masyarakat dan berkontribusi untuk membangun Indonesia yang lebih baik,” tutupnya.



Johan Rosihan Resmi Dilantik, Siap Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Dapil

Jakarta (01/10) — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Johan Rosihan, resmi dilantik hari ini untuk periode 2024-2029.

Dalam pernyataannya usai pelantikan, Johan menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya sebagai prioritas utama dalam menjalankan tugasnya di parlemen.

Hal itu disampaikan Johan Rosihan sebelum Pelantikan Anggota DPR Periode 2024-2029 di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa (01/10).

"Sebagai lembaga perwakilan rakyat, janji kita cuma satu, yaitu memperjuangkan aspirasi masyarakat. Itulah misi tunggal kami di MPR dan DPR. Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa suara rakyat terwujud dalam kebijakan yang diambil," ungkap Johan.

Sebagai anggota DPR yang terpilih untuk periode kedua, Johan mengakui bahwa telah banyak pelajaran berharga yang didapatkan dari periode sebelumnya.

"Periode pertama kemarin telah memberikan banyak catatan, dan kini saatnya kita lebih mendetailkan setiap rencana yang telah kita rintis," jelasnya.

Johan menekankan pentingnya transformasi dari rencana menjadi realisasi yang dapat dinikmati oleh masyarakat di daerah pemilihannya.

"Kami tidak hanya berbicara tentang persiapan, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap rencana yang telah dibuat dapat terwujud

dengan nyata. Itu adalah komitmen kami untuk masyarakat," sambungnya.

Dalam menjalankan tugasnya, Johan berjanji untuk tetap menjaga amanah yang diberikan oleh rakyat. Ia percaya bahwa kepercayaan yang diberikan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas.

"Saya akan terus berusaha untuk menjadi suara masyarakat di DPR, menyuarakan harapan dan aspirasi mereka dalam setiap kebijakan yang diambil," tambah Johan.

Aleg FPKS Dapil Nusa Tenggara Barat I itu juga menyatakan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan menjadi prioritas. Ia berharap masyarakat dapat terus memberikan masukan dan aspirasi mereka, agar kebijakan yang dihasilkan dapat lebih mencerminkan kebutuhan dan harapan rakyat.

Sebagai anggota DPR yang berpengalaman, Johan Rosihan menutup pernyataannya dengan harapan agar periode ini dapat menjadi kesempatan untuk membawa perubahan positif bagi masyarakat.

"Kami akan terus bekerja keras untuk mewujudkan impian dan harapan masyarakat. Semoga dengan kerja sama yang baik antara DPR dan masyarakat, kita bisa menciptakan Indonesia yang lebih baik," tutup Johan.



"Kami tidak hanya berbicara tentang persiapan, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap rencana yang telah dibuat dapat terwujud dengan nyata. Itu adalah komitmen kami untuk masyarakat,"

H. JOHAN ROSIHAN, S.T

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil NTB I

PROGRAM UNGGULAN

FRAKSI PKS DPR RI



FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Kecatif Atrokrakif Substantif

Parlementaria (Diskusi Publik,
PKS Legislative Corner, PKS Legislative Report,
Ruang Aleg dan Internshipsks)



Diskusi, dialog, dan kolaborasi Fraksi PKS dengan pejabat publik, pakar, ahli, tokoh CSO, dan aktivis yang kompeten serta generasi muda untuk membahas, mengkaji, dan terlibat pada isu-isu publik dari sudut pandang parlemen.



Sah Dilantik Anggota DPR RI,

Reni Astuti Terus Perjuangkan Aspirasi dan Advokasi Masyarakat

Jakarta (01/10) — Anggota DPR RI terpilih Periode 2024-2029, Reni Astuti tegaskan komitmen untuk selalu perjuangkan aspirasi dan advokasi masyarakat.

Reni resmi dilantik sebagai Anggota DPR RI Periode 2024-2029 dari Daerah Pemilihan Jawa Timur 1 (Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo). Pelantikan tersebut digelar di Komplek MPR/DPR Senayan, Jakarta, pada Selasa (01/10).

Bersama 580 Anggota DPR RI terpilih lainnya Reni menyampaikan sumpahnya sebagai wakil rakyat. Politisi perempuan PKS itu terpilih sebagai salah 1 dari 10 wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Timur 1 yang meliputi Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo.

Reni Astuti menyatakan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi dan advokasi masyarakat, khususnya di wilayah yang diwakilinya. "Saya akan melanjutkan

perjuangan untuk memastikan suara masyarakat terdengar dan kepentingan mereka terlayani dengan baik di tingkat nasional," ujarnya.

Sebelumnya, Reni dikenal sebagai wakil rakyat yang sangat peduli terhadap masyarakat. Ia telah menjadi anggota dewan sejak tahun 2009 dan menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya untuk periode 2019-2024.

Kinerjanya beliau selama menjabat sebagai wakil rakyat mendapatkan apresiasi luas dari berbagai kalangan.

Berbagai ucapan selamat dan dukungan mengalir dari komunitas guru, pengemudi ojek online, kaum ibu-ibu, generasi muda, tokoh masyarakat, politisi, hingga pejabat publik

dari tingkat RW hingga Wali Kota Surabaya.

Mereka mengakui langsung dampak positif kinerja Reni Astuti dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat selama bertahun-tahun.

"Selamat dan sukses kepada bu Reni, selamat bertugas di tempat yang baru, terulash amanah, terulash menjaga silaturahmi," ungkap Walikota Surabaya Eri Cahyadi.

Terpisah, Ketua TP PKK Kota Surabaya Rini Indriyani juga memberi pesan agar kesuksesan senantiasa mengiri serta dapat berkontribusi lebih luas lagi bagi masyarakat.

"Selamat untuk bu Reni yang sudah ke Senayan, nanti kita akan mampir dan menitipkan aspirasi warga Surabaya lewat bu Reni," ucap politisi PSI William Wirakusuma.

Tidak hanya dari kalangan pejabat, masyarakat yang mengenal secara dekat legislator kota Surabaya tiga periode itu pun turut bahagia serta penuh harapan.

"Terus bermanfaat untuk rakyat kecil, moga Surabaya jadi lebih maju," terang Ahmad Ketua Ojol Speed Kota Surabaya.

"Tetap amanah, tetap humble dan kritis dan manfaat baik bagi kita semua," beber tokoh masyarakat Gus Hadi.

"Moga diberi kelancaran, kesehatan dalam mengemban tugasnya," ulas Khunzul pengurus kampung di wilayah Pacar Kembang.



"Saya akan melanjutkan perjuangan untuk memastikan suara masyarakat terdengar dan kepentingan mereka terlayani dengan baik di tingkat nasional,"

RENI ASTUTI, S.Si., M.PSDM.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Jawa Timur I

Dengan pengalaman dan dedikasinya, Reni Astuti diharapkan dapat membawa perubahan yang lebih baik bagi

masyarakat Jawa Timur dan Indonesia secara keseluruhan.

Dilantik Kembali, Mardani Ali Sera Perjuangkan Kebijakan Pro-Rakyat

Padang (30/09) --- Di akhir masa jabatan sebagai Anggota DPR RI masa bakti 2019-2024, Hermanto mengadakan roadshow di daerah pemilihan ke 10 kabupaten/kota dapil Sumbar 1

Dalam kesempatan tersebut, Mardani menyampaikan komitmen kuat untuk memprioritaskan perjuangan bagi kepentingan rakyat di setiap kebijakan yang akan digagas selama masa jabatannya.

Mardani mengungkapkan visinya untuk menjadi pejuang yang konsisten dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat.

Hal itu disampaikan Mardani sebelum Pelantikan Anggota DPR Periode 2024-2029 di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa (01/10).

"Mohon doa dari seluruh rakyat Indonesia agar saya bisa menjalankan amanah ini dengan baik. Saya ingin memastikan bahwa saya

menjadi salah satu pejuang yang betul-betul bekerja untuk rakyat," katanya.

Lebih lanjut, Aleg FPKS Dapil DKI Jakarta I itu menekankan pentingnya tugas komisi di DPR sebagai wadah utama dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran.

Mardani berkomitmen untuk mengoptimalkan peran apapun yang akan diembannya di komisi, demi memastikan keberpihakan pada rakyat.

"Dimanapun saya ditempatkan, saya akan bekerja keras untuk membuat komisi tersebut benar-benar menjadi alat perjuangan yang fokus pada kepentingan rakyat. Misi

saya adalah memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan membawa kebahagiaan bagi rakyat," tegas Mardani.

Dalam pernyataannya, Mardani menekankan bahwa DPR sebagai lembaga legislatif memiliki peran strategis dalam menciptakan kebijakan yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat.

Mardani percaya bahwa setiap komisi harus berfungsi maksimal untuk menjadi penggerak perubahan yang berorientasi pada kesejahteraan.

"Kinerja komisi harus dioptimalkan agar DPR dapat benar-benar menjadi representasi kepentingan rakyat. Setiap kebijakan yang dihasilkan harus berbasis pada kebutuhan nyata, dan bukan hanya formalitas semata," ujar Politikus PKS yang dilantik pada hari ini.

Mardani juga menyoroti pentingnya kolaborasi dengan semua pihak, baik internal di DPR maupun pihak eksternal, seperti pemerintah dan masyarakat sipil.

"Kami perlu memastikan semua elemen bersinergi demi rakyat. Jangan sampai ada kebijakan yang tidak pro-rakyat dan malah merugikan," tambahnya.

Menutup pernyataannya, Mardani Ali Sera menyampaikan rasa optimisme dan kesiapan untuk melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat dengan sebaik-baiknya.



"Kinerja komisi harus dioptimalkan agar DPR dapat benar-benar menjadi representasi kepentingan rakyat. Setiap kebijakan yang dihasilkan harus berbasis pada kebutuhan nyata, dan bukan hanya formalitas semata,"

Dr. H. MARDANI, M.Eng

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta I

"Saya berharap, dalam lima tahun ke depan, kami bisa memberikan dampak yang nyata bagi kesejahteraan rakyat. Perjuangan ini adalah

amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab penuh," pungkasnya.

Resmi Dilantik sebagai Anggota DPR, Rofik Hananto: Berkomitmen Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Jakarta (01/10) — Rofik Hananto, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk periode 2024-2029,

kembali menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Dapil VII Jawa Tengah.

Setelah dilantik hari ini, Rofik menyampaikan visinya untuk membawa rencana-rencana strategis yang akan memberi manfaat langsung bagi masyarakat di wilayah tersebut.

Hal itu disampaikan Rofik sebelum Pelantikan Anggota DPR Periode 2024-2029 di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa (01/10).

“Visi saya sederhana namun bermakna, yaitu membawa lebih banyak kebaikan bagi masyarakat di Dapil saya. Saya ingin melahirkan rencana-rencana yang konkret dan terbaik. Pengabdian ini merupakan bentuk khidmat saya kepada masyarakat dan

bangsa, dan tentunya atas nama partai,” ujar Rofik.

Sebagai Wakil Rakyat yang kembali terpilih untuk periode kedua, Rofik menegaskan bahwa tugasnya tidak hanya sekadar melanjutkan program-program yang sudah berjalan, tetapi juga menciptakan inovasi-inovasi baru yang dapat membantu percepatan pembangunan di daerah.

Lebih lanjut, Rofik menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap masalah-masalah lokal yang dihadapi masyarakat di Dapil VII Jawa Tengah.

“Saya berkomitmen untuk membawa aspirasi masyarakat Dapil VII Jawa Tengah ke dalam setiap pembahasan di DPR. Saya akan memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya sesuai dengan

kebutuhan masyarakat, tetapi juga memberi solusi konkret yang bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh mereka,” tegasnya.

Dalam pernyataannya, Aleg FPKS Dapil VII Jawa Tengah itu juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memaksimalkan pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan di wilayah tersebut.

“Saya akan terus mendorong kerja sama lintas sektor, baik dengan pemerintah pusat, daerah, maupun dengan masyarakat sipil, untuk memastikan program-program yang dirancang dapat berjalan dengan baik dan berdampak langsung pada masyarakat,” sambung Rofik.

Terakhir, Rofik menyampaikan bahwa lima tahun ke depan akan menjadi waktu yang penting untuk berkhidmat dan mempersembahkan yang terbaik bagi bangsa, khususnya untuk warga Dapil VII Jawa



“Saya akan terus mendorong kerja sama lintas sektor, baik dengan pemerintah pusat, daerah, maupun dengan masyarakat sipil, untuk memastikan program-program yang dirancang dapat berjalan dengan baik dan berdampak langsung pada masyarakat,”

H. ROFIK HANANTO, S.E

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah VII

Tengah.

“Amanah ini adalah tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh

komitmen. Bersama PKS, saya siap memperjuangkan Indonesia yang lebih baik dan sejahtera,” tukasnya.



Kembali Duduk sebagai Anggota Dewan, Saadiah Uluputty Bawa Semangat Nilai Kemaritiman

Jakarta (01/10) — Anggota DPR RI Periode 2024-2029 Fraksi PKS, Saadiah Uluputty kembali terpilih sebagai anggota dewan mewakili daerah pemilihan (dapil) Maluku, dia tetap membawa semangat nilai-nilai kemaritiman.

“Oleh karena itu maka sebagai anggota DPR RI dari Dapil Maluku yang berciri kepulauan, tentu hal yang menjadi concern kami adalah memperjuangkan fungsi legislasi, regulasi berpihak kepada daerah-daerah kepulauan, dan juga perencanaan pembangunan

berpihak ke daerah maritim,” jelas Saadiah usai Pelantikan Anggota DPR Periode 2024-2029 di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa (01/10).
Lanjutnya, Saadiah mengatakan prioritas kedua ialah bagaimana nilai keadilan, distribusi pembangunan kepada daerah-daerah yang hari ini ada ketimpangan antara daerah di Indonesia Timur utamanya masih tergolong miskin, agar bisa disuarakan dan diadvokasi.

“Ada strategi-strategi, lobby, dan juga menyampaikan aspirasi-aspirasi ini agar pemerintah juga memberikan atensi, ada political will, ada good will agar kue-kue pembangunan, agar anggaran

dan perencanaan pembangunan juga bisa menuntaskan ini,” sebut ia.

Semacam affirmation action kepada daerah-daerah miskin, terutama daerah yang kaya secara potensi sumber daya alamnya, tetapi masyarakat di wilayah itu malah tergolong miskin. Menurutnya, menjadi salah satu hal yang perlu untuk disuarakan dan disampaikan.

“Nah kemudian akses pendidikan, kesehatan, kemudian juga pendapatan, ini tentu menjadi variabel-variabel utama juga sebenarnya untuk bisa disampaikan kepada pemerintah,” tutup Saadiah.

“Ada strategi-strategi, lobby, dan juga menyampaikan aspirasi-aspirasi ini agar pemerintah juga memberikan atensi, ada political will, ada good will agar kue-kue pembangunan, agar anggaran dan perencanaan pembangunan juga bisa menuntaskan ini,”

SAADIAH ULUPUTTY, S.T

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Maluku



Dilantik untuk Kelima kalinya Mewakili Kalsel I, Habib Aboe Komitmen Jadi Akselerator Pembangunan di Dapil

Jakarta (01/10) — Hari ini menjadi momen bersejarah bagi Habib Aboe Bakar Alhabsyi yang kembali dilantik sebagai Anggota DPR RI untuk periode 2024-2029. Untuk kali kelima,

Aboe Bakar terpilih mewakili Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan I, setelah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat di wilayah tersebut.

"Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat

"Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Kalimantan Selatan atas kepercayaan yang telah diberikan kembali kepada saya untuk mengemban amanah ini. Insha Allah, saya akan menjalankan tugas ini sebaik mungkin untuk lima tahun ke depan,"

HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Kalimantan Selatan I

Kalimantan Selatan atas kepercayaan yang telah diberikan kembali kepada saya untuk mengemban amanah ini. Insha Allah, saya akan menjalankan tugas ini sebaik mungkin untuk lima tahun ke depan," ujar Sekjend DPP PKS tersebut.

Sebagai salah satu tokoh berpengalaman di DPR RI, Aboe Bakar menegaskan komitmennya untuk terus menjadi akselerator pembangunan di Kalimantan Selatan.

"Kita akan terus berupaya mendorong percepatan pembangunan di Kalimantan Selatan, baik di bidang infrastruktur, ekonomi, maupun pendidikan, demi kemajuan dan

kesejahteraan masyarakat," tambahnya.

Dengan dilantiknnya Aboe Bakar Alhabsyi untuk periode kelimanya, diharapkan ia dapat terus membawa aspirasi masyarakat Kalimantan Selatan dan memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Terpilihnya Aboe Bakar kembali menunjukkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap rekam jejak dan kinerjanya selama menjabat sebagai wakil rakyat di parlemen.



dr. Gamal: Bangun Kepercayaan Publik pada DPR dengan Integrity, Impact dan Inclusive

Jakarta (02/10) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Gamal Albinsaid mengajak pada seluruh Anggota DPR RI periode 2024-2029 yang baru dilantik untuk bersama-sama membangun citra dan kepercayaan publik dengan sebaik-baiknya.

"Kemarin kita baru menuntaskan pemilihan pimpinan DPR. Hari ini kita memiliki permasalahan besar terkait survei CSIS pada Desember 2023 yang menyatakan tingkat kepercayaan publik pada DPR adalah yang terendah, yaitu hanya 56,2% masyarakat yang percaya dengan DPR," ungkap Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur V ini.

Oleh karena itu, pria yang akrab disapa dokter Gamal ini berharap pimpinan baru DPR mampu meningkatkan kepercayaan publik pada DPR.

"Saya lihat ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk membangun kembali kepercayaan publik pada DPR. Yang pertama adalah Integrity, kita harus menunjukkan bahwa anggota DPR memiliki kesatuan pikiran, ucapan, dan tindakan, sehingga kita mampu memancarkan kejujuran dan ketulusan. Yang masyarakat butuhkan hari ini adalah anggota DPR yang otentik, orisinal, yang benar-benar dengan penuh ketulusan mengorbankan waktu, tenaga, pikirannya untuk memberikan dedikasi dan pengabdian penuh

ketulusan untuk masyarakat," tegas Dokter Lulusan Universitas Brawijaya ini.

Kedua, imbuhnya, adalah, impact. Banyak orang menganggap anggota DPR itu high profile dan low impact. Sibuk pencitraan, dampaknya kecil.

"Kita harus mampu membuktikan bahwa kita low profile and high impact. Don't try to impress people, but focus to impact people. Because impress will be lost, but the impact will survive. Maybe you are impressive, but are you

impactful?," terang inovator kesehatan ini.

Ketiga, kata dokter Gamal adalah inclusive. Banyak orang menganggap DPR itu elitis dan eksklusif, lebih mengutamakan kepentingan elit dan kurang memperjuangkan kepentingan masyarakat marginal.

"Kita sebagai Anggota DPR harus bisa menempatkan diri kita di dalam sudut pandang masyarakat yang hari ini hidup dalam berbagai keterbatasan, berempati dengan 25 juta masyarakat kita hidup dalam jurang kemiskinan, dan menghasilkan solusi nyata untuk masyarakat marginal. DPR untuk semua, menyatu dengan masyarakat marginal, mengutamakan kepentingan masyarakat marginal diatas kepentingan elit," tutup Dokter peraih banyak penghargaan ini.

“Kita sebagai Anggota DPR harus bisa menempatkan diri kita di dalam sudut pandang masyarakat yang hari ini hidup dalam berbagai keterbatasan, berempati dengan 25 juta masyarakat kita hidup dalam jurang kemiskinan, dan menghasilkan solusi nyata untuk masyarakat marginal.

dr. GAMAL

Anggota Fraksi PKS DPR RI Jawa Timur V



Kembali Terpilih sebagai
Wakil Rakyat,

Aus Hidayat Nur Tegaskan Terus Berbuat Melayani Rakyat

Jakarta (03/10) --- Salah satu anggota DPR yang baru saja dilantik adalah Aus Hidayat Nur yang berasal dari daerah pemilihan Kalimantan Timur.

"Alhamdulillah dan innalillah, atas kinerja pada periode lalu, masyarakat Kalimantan Timur kembali menitipkan amanah kepada saya untuk memperjuangkan aspirasi mereka di parlemen," ucap Aus melalui rilis media, Selasa (01/10/2024).

Politisi PKS tersebut memang sudah beberapa periode mendapat kepercayaan masyarakat. Ia mengawali karir di DPR sejak periode 2009-2014. Kemudian pada tahun 2018 ia menggantikan Hadi Mulyadi yang terpilih menjadi Wakil Gubernur. Lalu pada pemilu 2019 dan 2024 Aus kembali mengumpulkan suara yang cukup untuk mengantarannya duduk di Senayan.

"Selama periode sebelumnya saya sudah mengadvokasi masyarakat untuk mendapatkan hak tanah mereka melalui program PTSL bekerjasama dengan Kementerian ATR BPN. Saya juga berkeliling daerah-daerah pedalaman di Kalimantan Timur untuk menyerap aspirasi masyarakat sembari mengadakan sosialisasi 4 Pilar atau sosialisasi Pemilu dan Pilkada," kenang Aus ketika ditugaskan di Komisi II DPR RI.

dibutuhkan Benua Etam," ungkap Aus.

"Semangat perjuangan PKS adalah semangat memperjuangkan agama, kebangsaan, keadilan dan kemanusiaan. Dalam kerangka persatuan demi mewujudkan kesejahteraan Rakyat, kami siap untuk memajukan Kalimantan Timur melalui pemerintahan yang baru," pungkas Aus.

Modal berupa kepemimpinan yang lengkap baik di DPR maupun MPR membuat PKS sangat siap untuk melayani rakyat. Dan dengan modal itu juga Fraksi PKS di DPR bisa membentuk kepemimpinan dengan cepat

Bertekad Sukseskan Pilkada

Sejalan dengan gerakannya menyanggahi masyarakat pelosok untuk menyosialisasikan Pilkada, Aus pun berkeinginan kuat untuk menjadikan Pilkada serentak 2024 ini sebagai jalan untuk menganugerahi masyarakat Kalimantan Timur dengan sosok yang tepat sebagai kepala daerah.

"Untuk itu saya mendukung pasangan nomor urut 2, Rudi dan Seno. Karena dari hati nurani saya meyakini merekalah pasangan yang

"Untuk itu saya mendukung pasangan nomor urut 2, Rudi dan Seno. Karena dari hati nurani saya meyakini merekalah pasangan yang dibutuhkan Benua Etam,"

Semangat perjuangan PKS adalah semangat memperjuangkan agama, kebangsaan, keadilan dan kemanusiaan.

Dalam kerangka persatuan demi mewujudkan kesejahteraan Rakyat, kami siap untuk memajukan Kalimantan Timur melalui pemerintahan yang baru."

KH. AUS HIDAYAT NUR

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Kalimantan Timur



Dilantik Jadi Anggota DPR RI Terpilih Jabar VII, Haji Jalal Bertekad Perjuangkan Kepentingan Rakyat

Jakarta (04/10) -- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dari Fraksi PKS, Jalal Abdul Nasir pasca dilantik langsung mengikuti foto bersama dengan 52 anggota DPR lainnya dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Foto ini diambil di depan Gedung DPR/MPR RI yang ikonik, dikenal sebagai Gedung Kura-Kura, sebelum pelaksanaan agenda resmi legislatif.

Sebagai Anggota DPR terpilih, Haji Jalal bersama rekan-rekan dari Fraksi PKS siap mengemban amanah yang telah diberikan oleh masyarakat untuk lima tahun ke depan.

"PKS terus berkomitmen dalam memperjuangkan aspirasi rakyat dan membawa perubahan yang positif di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial," ungkap Aleg terpilih dari daerah pemilihan Jawa Barat VII ini.

Pada kesempatan

tersebut, pria yang akrab disapa Haji Jalal menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh konstituen yang telah memercayainya untuk menjalankan tugas di parlemen.

"Saya akan bekerja dengan sebaik-baiknya untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya dari dapil Jabar VII," ungkap Haji Jalal.

Sesi foto bersama ini merupakan bagian dari rangkaian persiapan para anggota DPR RI sebelum melaksanakan tugas legislatif yang akan segera dimulai. Mereka berharap dapat memberikan kontribusi nyata demi kesejahteraan bangsa dan negara.

"PKS terus berkomitmen dalam memperjuangkan aspirasi rakyat dan membawa perubahan yang positif di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial,"

H. JALAL ABDUL NASIR, AK.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VII



**Follow
Akun tiktok
Fraksi PKS DPR RI**

@fraksipksdprri



Alifudin: Komitmen PKS untuk Lanjutkan Pembangunan dan Sejahteraan Masyarakat Kalbar I

Jakarta (01/10) --- Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Alifudin menyatakan untuk memperkuat komitmen, melanjutkan pembangunan di daerah pilihannya.

Alifudin menyampaikan harapannya saat terpilih kembali untuk periode kedua 2024-2029.

"Sebagai mantan anggota Komisi Kesehatan dan Tenaga Kerja, saya bertekad untuk melanjutkan kebaikan-kebaikan yang telah dicapai dan memperbaiki hal-hal yang kurang di masa lalu," ujar Alifudin dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-2, di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, pada Selasa (01/10).

"Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat adalah prioritas kami, dan kami akan terus berupaya keras untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat," tegasnya.

Dapil dari Kalimantan Barat I, menekankan pentingnya mempertahankan program-program yang telah berjalan baik.

"Kami akan mengawal setiap program yang telah terbukti berhasil, serta melakukan evaluasi untuk meningkatkan efektivitasnya," tambahnya.

Atas semangat yang kuat, Alifudin menegaskan keyakinannya bahwa PKS akan terus bersinar di masa depan.

"Inshaallah, dengan dukungan masyarakat, PKS ke depan akan semakin jaya. Kami percaya bahwa bersama-sama kita bisa menciptakan perubahan yang lebih baik," tutupnya.

"Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat adalah prioritas kami, dan kami akan terus berupaya keras untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat,

H. ALIFUDIN, S.E., M.M

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Kalimantan Barat I



Resmi Jadi Aleg Terpilih 2024-2029, Ledia: Efektivitas Implementasi Kebijakan Masih Jadi PR Pemerintah

Jakarta (01/10) --- Anggota Legislatif Periode 2024 - 2029 dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa mengungkapkan temuan kebijakan yang masih perlu dievaluasi implementasinya, khususnya UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Hal itu diungkapkan Ledia sebelum Rapat Paripurna DPR RI Ke-2 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa (01/10).

"Pasa dasarnya ketika kita bicara tentang regulasi, bukan berarti harus bikin undang-undang baru, tetapi bagaimana implementasi dari kebijakan tersebut," tutur Ledia.

Di samping itu, menurut Ledia, memang ada sejumlah undang-undang lain yang mesti diperbaiki pada periode yang akan datang, misalnya UU Cipta Kerja, UU Penjaminan Produk

Halal, dan UU Pengelolaan Keuangan Haji.

"Keinginannya pengelolaan keuangan haji yang ingin diubah sebagai amanat dari Pansus Angket Haji 2024, yang sebenarnya kita sendiri sedang mempersiapkan untuk yang ke depan," ujar Aleg dari Dapil Jawa Barat I itu.

"Di Pansus Angket Haji di tahun 2024 itu mengamanatkan dua undang-undang, satu tentang pengelolaan keuangan haji dan mengenai penyelenggaraan ibadah haji. Semoga bisa kita jalankan," tutup Ledia.

Temuan kebijakan yang masih perlu dievaluasi implementasinya, khususnya UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Pasa dasarnya ketika kita bicara tentang regulasi, bukan berarti harus bikin undang-undang baru, tetapi bagaimana implementasi dari kebijakan tersebut,"

Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat I



Dilantik Jadi Aleg Muda PKS, Ismail Bachtiar Dorong Kesejahteraan dan Keterlibatan Generasi Muda

Jakarta (01/10) --- Anggota Fraksi PKS dari dapil Sulawesi Selatan VII, Ismail Bachtiar dengan bangga menyatakan bahwa Paripurna Istimewa telah berhasil diselesaikan.

"Acara ini merupakan momentum penting yang membawa harapan besar bagi masyarakat, terutama di daerah pemilihan saya," ungkap Ismail dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-2, di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa (01/10).

"Paripurna ini adalah langkah awal yang luar biasa. Kami berharap banyak inisiatif baru dapat kami bawa untuk masyarakat," ujar Ismail.

Ismail juga menekankan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam setiap kebijakan yang diambil.

"Dengan kehadiran anak-anak muda di PKS, kami berkomitmen untuk menjadikan

isu generasi muda sebagai prioritas utama dalam kebijakan kami," pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, Ismail juga menekankan perlunya kebijakan yang pro terhadap generasi milenial.

"Kami ingin memastikan bahwa suara generasi muda didengar dan diakomodasi dalam setiap keputusan yang kami ambil," tegasnya.

Ismail berharap dalam Paripurna Istimewa ini, melahirkan berbagai program yang mendukung perkembangan dan kesejahteraan generasi muda.

"Dengan kehadiran anak-anak muda di PKS, kami berkomitmen untuk menjadikan isu generasi muda sebagai prioritas utama dalam kebijakan kami. Kami ingin memastikan bahwa suara generasi muda didengar dan diakomodasi dalam setiap keputusan yang kami ambil."

ISMAIL BACHTIAR, S.K.M., M.M.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Sulawesi Selatan II



Resmi Dilantik Aleg 2024-2029, Ateng Sutisna Akui Prioritaskan Ketersediaan Air dan Pupuk

Jakarta (01/10) --- Anggota DPR RI Periode 2024 - 2029 dari Fraksi PKS, Ateng Sutisna mengaku akan memprioritaskan keluhan masyarakat terkait ketersediaan air, pupuk, dan padi unggul di bidang pertanian.

Hal itu diungkapkan Ateng pada Rapat Paripurna DPR RI Ke-2 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa (01/10).

"Sesuai dengan permintaan dari konstituen bahwa saat ini masyarakat Majalengka dan Sumedang kalau memanfaatkan air dari Jatigede harus membayar PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), itu akan memberatkan sekali," ungkap Ateng.

"Banyak keluhan terkait dengan ketersediaan air, pupuk, dan padi unggul jadi yang kita perjuangkan di bidang pertanian," lanjut Aleg dari Dapil Jabar IX.

Selain itu, menurut Ateng,

Majalengka sebagai daerah yang menjadi sentra pembibitan juga harus menjadi fokus pemerintah, khususnya untuk membantu petani kecil mendapatkan sertifikasi.

Sertifikasi petani harus dilakukan guna membantu mereka dalam meningkatkan hasil panen, mendapatkan eksposur ke pasar yang lebih luas, dan meningkatkan penghidupan mereka.

"Kemudian di bidang peternakan, khususnya domba, kami menginginkan peternakan domba itu dilakukan oleh perusahaan yang mampu dan besar, jangan hanya diserahkan kepada petani," tukas Ateng.

"Sesuai dengan permintaan dari konstituen bahwa saat ini masyarakat Majalengka dan Sumedang kalau memanfaatkan air dari Jatigede harus membayar PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), itu akan memberatkan sekali,"

Ir. H. ATENG SUTISNA

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat IX

Dilantik sebagai Aleg, Abdul Hadi Akan Perjuangkan NTB Jadi Lumbung Pangan Nasional

Jakarta (02/10) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS dari Dapil NTB II, Abdul Hadi berhadapan bisa memperjuangkan NTB jadi lumbung pangan Nasional melalui perannya di DPR RI.

"NTB mempunyai potensi yang sangat besar sebagai lumbung pangan Nasional, diantaranya NTB memproduksi padi sekitar 1,54 Juta Ton tahun 2023, yang tersebar di Lombok Tengah, Lombok Timur dan Lombok Barat. Selama ini NTB sudah menjadi pemasok beras ke wilayah Indonesia bagian timur yang masih kekurangan stok pangan," jelas Abdul Hadi saat ditemui di gedung DPR Senayang Rabu, (02/10).

Disamping produksi beras, NTB juga merupakan produsen Jagung yang cukup tinggi, di tahun 2023 sebesar 1,28 juta ton, walaupun hal tersebut mengalami penurunan sebanyak 140,89 ribu ton atau 9,91 persen dibandingkan pada 2022

yang sebesar 1,42 juta ton.

"Produksi jagung NTB juga cukup baik, bahkan NTB telah mengeksport jagung ke berbagai negara, termasuk Filipina dan Korea Selatan," ungkap Politisi PKS ini.

Selain beras dan jagung, NTB juga mempunyai potensi di pengembangan Komoditas Hortikultura seperti Bawang Merah, mangga, jeruk, dan pisang.

Abdul Hadi mengungkapkan produksi bawang merah NTB juga sangat berpotensi dan terkenal tidak hanya di pasar nasional tetapi juga diekspor ke negara tetangga.

Potensi dibidang peternakan juga sangat berpotensi baik dalam rangka mewujudkan NTB

sebagai lumbung pangan nasional, terutama peternakan sapi potong.

"Pulau Sumbawa dan Lombok memiliki lahan yang cocok untuk pengembangan peternakan sapi. Sapi dari NTB banyak dikirim ke wilayah-wilayah lain di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan daging sapi nasional, terutama menjelang hari-hari besar seperti Idul Fitri dan Idul Adha," jelas Abdul Hadi.

Ditengah potensi yang dimiliki oleh NTB untuk menjadi lumbung pangan nasional, NTB mempunyai beberapa tantangan.

"Tantangan yang harus dihadapi oleh NTB adalah support dan komitmen dari pemerintah daerah untuk memajukan sektor pertanian, Perkebunan dan peternakan. Kami di DPR RI akan memperjuangkan agar pemerintah pusat juga ikut berkontribusi dan menyelesaikan tantangan tersebut. Diantara tantangan tersebut antara lain Infrastruktur irigasi yang terbatas, Akses Transportasi dan Distribusi serta Keterbatasan Akses Teknologi dan alat-alat pertanian," ungkap Abdul Hadi.

Abdul Hadi memohon doa dan support dari Masyarakat NTB agar bisa memberikan kontribusi untuk pengembangan NTB sebagai Lumbung Pangan Nasional dengan memaksimalkan peran sebagai Anggota DPR RI.



"Tantangan yang harus dihadapi oleh NTB adalah support dan komitmen dari pemerintah daerah untuk memajukan sektor pertanian, Perkebunan dan peternakan. Kami di DPR RI akan memperjuangkan agar pemerintah pusat juga ikut berkontribusi dan menyelesaikan tantangan tersebut. Diantara tantangan tersebut antara lain Infrastruktur irigasi yang terbatas, Akses Transportasi dan Distribusi serta Keterbatasan Akses Teknologi dan alat-alat pertanian,"

ABDUL HADI, S.E., M.M.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Nusa Tenggara Barat II

Kembali Dilantik sebagai Aleg 2024-2029, Nevi Zuairina Siap Perjuangkan Kesejahteraan Kaum Ibu, UMKM, dan Petani

Jakarta (01/10) — Nevi Zuairina, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), resmi dilantik untuk periode 2024-2029.

Dalam pernyataan usai pelantikan, Nevi menegaskan bahwa visinya untuk melanjutkan perjuangan yang telah dirintis pada periode pertama, terutama dalam memperjuangkan hak-hak kaum ibu, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta petani.

Nevi mengungkapkan rasa syukurnya atas kepercayaan yang diberikan rakyat untuk kembali melanjutkan tugasnya di parlemen.

Hal itu disampaikan Nevi setelah Pelantikan Anggota DPR

Periode 2024-2029 di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa (01/10/2024).

"Saya sangat berharap dapat melanjutkan visi-misi yang sudah kami jalankan di periode pertama, yaitu fokus pada pemberdayaan ibu-ibu, pengembangan UMKM, serta memperjuangkan hak-hak petani," ujarnya.

Selama periode pertamanya, Nevi telah menaruh perhatian besar pada sektor-sektor yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Ia

menekankan bahwa program-program yang mendukung pemberdayaan perempuan, terutama ibu-ibu, serta UMKM akan menjadi prioritasnya lagi di periode mendatang.

"Saya ingin memastikan bahwa ibu-ibu, sebagai pilar keluarga, mendapatkan perhatian yang layak. Begitu juga UMKM, mereka adalah tulang punggung perekonomian kita," ungkap Nevi.

Aleg FKPS dari Dapil Sumatera Barat I itu juga menyroti pentingnya mendukung petani dalam menghadapi tantangan global yang semakin berat. Ia berkomitmen untuk terus memperjuangkan kebijakan yang mendorong kesejahteraan petani di berbagai wilayah.

"Petani adalah ujung tombak ketahanan pangan kita, dan sudah sepatutnya mereka mendapat perhatian lebih besar," tegasnya.

Selain itu, Nevi mengingatkan pentingnya menjaga dan memelihara nilai-nilai religius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baginya, nilai-nilai religius merupakan fondasi penting dalam membangun masyarakat yang berkeadaban.

"Kita akan terus menjaga semangat religiusitas agar senantiasa hadir dalam setiap kebijakan dan program yang dijalankan," imbuhnya.

Dalam menghadapi periode kedua ini, Nevi berharap dapat ditempatkan di



"Saya berharap komisi yang nanti saya tempati bisa sejalan dengan program yang sudah kami jalankan di periode pertama, agar bisa lebih optimal dalam menyentuh kehidupan banyak orang,"

Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Fraksi PKS DPR RI
Dapil Sumatera Barat II

komisi yang sesuai dengan visimisinya, sehingga dapat melanjutkan program-program yang telah dirintis sejak awal.

"Saya berharap komisi yang nanti saya tempati bisa sejalan dengan program yang sudah kami jalankan di periode pertama, agar bisa lebih optimal dalam menyentuh kehidupan banyak orang," ucapnya.

Melalui semangat dan

komitmen yang terus berlanjut, Nevi berkomitmen untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya, khususnya dalam bidang pemberdayaan perempuan, UMKM, petani, dan nilai-nilai religius.

"Kami akan terus bekerja keras untuk membawa perubahan yang lebih baik dan lebih menyentuh kehidupan rakyat banyak," pungkaskanya.

Usai Dilantik, Riyono Siap Kawal Pertumbuhan Ekonomi Lewat Pemberdayaan Petani dan Nelayan

Jakarta (01/10) — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Riyono resmi dilantik untuk masa jabatan 2024-2029.

Dalam kesempatan pelantikan ini, Riyono menggarisbawahi komitmennya untuk terus memperjuangkan nasib petani, nelayan, dan peternak di daerah pemilihannya, yakni Dapil Jawa Timur VII, sekaligus di seluruh Indonesia.

Hal itu disampaikan Riyono setelah Pelantikan Anggota DPR Periode 2024-2029 di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa (01/10/2024).

“Saya akan menjalankan amanah ini dengan sepenuh hati. Fokus utama saya adalah membantu petani, nelayan, dan peternak agar mereka bisa

menjadi aktor utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia,” ujar Riyono, setelah mengikuti prosesi pelantikan.

Dalam visinya, Riyono berkomitmen untuk memastikan bahwa petani, nelayan, dan peternak tidak hanya menjadi penopang ketahanan pangan nasional, tetapi juga menjadi pilar pertumbuhan ekonomi yang kuat. Ia berharap dengan dukungan kebijakan yang tepat, sektor-sektor tersebut bisa semakin berdaya dan mandiri.

“Ke depan, petani dan nelayan harus menjadi tulang

pengung bagi pertumbuhan ekonomi kita. Mereka memiliki peran strategis dalam memastikan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat, dan ini yang akan saya perjuangkan di DPR,” jelas Riyono.

Selain itu, Riyono menekankan pentingnya memastikan petani mendapatkan akses terhadap teknologi pertanian modern dan subsidi yang memadai. Hal ini dinilai penting untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka.

Aleg FKPS dari Dapil Jawa Timur VII itu juga menyinggung pentingnya keberpihakan kebijakan negara terhadap petani dan nelayan.

Menurutnya, regulasi yang mendukung kemajuan sektor pertanian dan perikanan harus terus diperkuat, termasuk akses pasar, pembiayaan, serta pendampingan teknis yang dibutuhkan oleh petani dan nelayan.

“Kami akan mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan dukungan bagi sektor ini, baik dalam bentuk regulasi maupun program-program pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan petani dan nelayan di lapangan,” katanya.

Menariknya, Riyono juga mengapresiasi kehadiran sembilan legislator muda dari Fraksi PKS di DPR RI periode ini. Ia menilai bahwa kolaborasi



“Kita semua berharap, dengan dukungan yang tepat, sektor-sektor ini akan semakin kuat dan berdaya. Saya akan berjuang sekuat tenaga untuk memastikan aspirasi masyarakat dapat terwujud dengan baik,”

RIYONO, S.Kel., M.Si.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Timur VII

dengan generasi muda yang cerdas dan inovatif akan membawa angin segar dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat di parlemen.

“Kehadiran anak muda dengan gagasan-gagasan

cemerlang di DPR RI akan menjadi energi positif bagi perjuangan kita. Kita berharap pemikiran-pemikiran segar ini dapat membantu mewujudkan kesejahteraan rakyat,” ungkapnya.



Netty Prasetiyani Ajak Perempuan Politik Bersatu dan Berkomitmen Sahkan RUU yang Berpihak Pada Mereka

Jakarta (04/10) — Politikus Perempuan PKS Netty Prasetiyani kembali terpilih sebagai Anggota DPR RI periode 2024-2029. Ia menyampaikan komitmennya untuk memperjuangkan kesejahteraan perempuan, anak dan keluarga bersama mitra kerjanya di DPR RI.

"Fokus saya adalah bagaimana mengajak perempuan politik dari partai mana pun untuk bersatu dan berkomitmen memperjuangkan regulasi yang berpihak pada kesejahteraan perempuan, anak dan keluarga. Salah satunya adalah RUU PPRT yang sudah 20 tahun mangkrak di DPR," ujar Netty dalam keterangan media, Jumat,

"Fokus saya adalah bagaimana mengajak perempuan politik dari partai mana pun untuk bersatu dan berkomitmen memperjuangkan regulasi yang berpihak pada kesejahteraan perempuan, anak dan keluarga. Salah satunya adalah RUU PPRT yang sudah 20 tahun mangkrak di DPR,"

Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VIII

(04/10).

"RUU PPRT merupakan RUU yang ditunggu-tunggu oleh para pekerja perempuan di Indonesia. Perempuan anggota DPR RI harus memiliki kepekaan lebih terhadap problem krusial yang dialami sesama perempuan dan berkomitmen memberikan solusi terbaik," katanya.

Jumlah problem krusial menyangkut perempuan, anak dan keluarga, lanjut Netty, menunggu inisiatif dan respon positif dari perempuan anggota DPR RI guna menyelesaikannya melalui regulasi yang berpihak.

Selain itu, Netty meminta pada pimpinan parpol dan pimpinan DPR agar secara serius menghadirkan suasana parlemen yang ramah perempuan.

"Pastikan adanya keterwakilan perempuan yang signifikan dalam setiap alat kelengkapan dewan. Selain itu, jangan ada lagi penyikapan yang merendahkan perempuan meski dalam bentuk kelakar di ruang-ruang parlemen," katanya.

Ketua DPP PKS ini mengatakan bahwa partainya sangat mendorong dan memberikan ruang luas bagi perempuan Indonesia untuk berkiprah dalam politik.

"Periode ini ada sembilan perempuan terpilih sebagai Anggota DPR RI dari PKS, tiga diantaranya adalah wajah baru. Pimpinan PKS memberi ruang pada perempuan untuk menduduki jabatan di fraksi mau pun di alat kelengkapan dewan lainnya," katanya.



PKS

Segenap Jajaran Pimpinan Fraksi PKS DPR RI
mengucapkan

Terima Kasih

Jazakumullah Ahsanal Jaza'a' kepada seluruh Anggota Fraksi PKS DPR RI dalam masa bakti 2019-2024.
Atas khidmatnya kepada Rakyat dan Umat. Semoga Segala kerja keras, kerja cerdas,
dan kerja ikhlas selama ini bernilai ibadah dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda.



fraksi.pks.id



FPKS DPR RI



fraksipksdprri



@FPKSDPRRI



PKS TV DPR RI



image istimewa

Nicaragua Putuskan Hubungan dengan Israel, HNW: Wajarnya Anggota Liga Arab dan OKI Ambil Langkah Serupa

Jakarta (13/10) — Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, mengapresiasi kebijakan Pemerintah Nicaragua,

yang juga berani memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel karena kejahatan genosida dan perilaku fasisnya terhadap Gaza/Palestina, serta mengingatkan negara-negara anggota Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam

(OKI) yang terlanjur mempunyai hubungan diplomatik atau me-'normalisasi' hubungan dengan Israel untuk mempertimbangkan serius perkembangan politik seperti ini dengan juga mengambil langkah serupa memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel.

"Demi tegaknya keadilan, ditaatinya hukum internasional dan penyelamatan peradaban/kemanusiaan, langkah tegas yang terakhir diambil oleh Pemerintah Nicaragua layak diapresiasi. Dan akan lebih bagus juga apabila Pemerintah Indonesia mengingatkan negara-negara OKI dan Liga Arab bila telah terlanjur membuat hubungan diplomatik atau me-'normalisasi' hubungan dengan Israel untuk meninjau ulang atau bahkan membatalkannya," ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, (12/10/2024).

HNW sapaan akrabnya mengatakan apalagi semua negara-negara Liga Arab dan OKI itu merupakan pendukung dari diterbitkannya Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) pada September lalu, yang mengabulkan fatwa ICJ dan mendesak agar Israel segera mengakhiri penjajahan ilegalnya terhadap Palestina dan bangsa Palestina dengan tenggat waktu 12 bulan.

"Jadi, sudah sewajarnya bila negara-negara Liga Arab dan OKI yang mendukung resolusi MU PBB ini mengikuti

langkah Nicaragua dll-nya, dengan segera mengakhiri hubungan diplomatiknya dengan Israel atau minimal menarik duta besarnya di Israel dan mengusir duta besar Israel dari negara mereka masing-masing, sebagai bukti keseriusan dukungan terhadap Resolusi MU PBB dan demi mewujudkan kemerdekaan Palestina," ujarnya.

Lebih lanjut, HNW mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia yang baru juga dapat lebih berperan aktif dalam berkomunikasi dan me-lobby negara-negara OKI dan Liga Arab itu sebagai upaya dalam membayar hutang menjejarah Indonesia menghardirkan kemerdekaan Palestina serta menghapuskan penjajahan di Palestina, sebagaimana amanat dari pembukaan UUD 1945.

"Ini salah satu momentum yang perlu dimaksimalkan," ujarnya.

Langkah Nicaragua ini bukan yang pertama di kawasan Benua Amerika. Sejak terjadinya genosida di Gaza pasca 7 Oktober 2023, beberapa negara di Amerika Latin, seperti Bolivia dan Kolombia sudah lebih dahulu memutus hubungan diplomatik dengan Israel. Sedangkan, Chile menarik duta besarnya dari Israel.

HNW menjelaskan bahwa demi keadilan hukum dan penyelamatan peradaban,

Nikaragua Putuskan Hubungan dengan Israel, HNW : Wajarnya Anggota Liga Arab dan OKI Ambil Langkah Serupa

« SEBELUMNYA

upaya untuk mengucilkan Israel dari pergaulan internasional sudah selanjutnya diikuti dan diapresiasi. Apalagi, bila melihat mandegnya sanksi terhadap Israel akibat pengaruh/dukungan Amerika Serikat yang kerap menggunakan hak vetonya membela kepentingan Israel di Dewan Keamanan PBB. Padahal, Israel sudah berulang kali membangkang terhadap hukum internasional dan berbagai resolusi PBB.

Bahkan, lanjut HNW, sekalipun Resolusi Majelis Umum PBB sudah diputuskan agar Israel mengakhiri penjajahan di Palestina sesuai fatwa ICJ, Israel bukan menaati malah melanjutkan kejahatan bahkan semakin parah, dengan memperluas penyerangan hingga Lebanon (termasuk terhadap rumah sakit dan sekolah) yang mengakibatkan ratusan warga sipil meninggal, melanjutkan serangan ke Gaza dan Tepi Barat yang makin menambah lebih dari 41 ribu korban tewas dari kalangan sipil yang mayoritasnya adalah perempuan dan anak-anak,

Israel kemudian juga merampas lahan markas UNRWA (Badan PBB untuk Pengungsi Palestina) di Jerusalem Timur, dan kemarin menyerang pasukan perdamaian PBB (UNIFIL) di Lebanon Selatan yang di antara korbannya adalah 2 prajurit TNI, dan dengan arogannya Israel juga melarang Sekjen PBB untuk masuk ke negara Israel.

"Anehnya, sudah berulang kali PBB dilecehkan oleh Israel, tetapi sanksi tegas belum juga dijatuhkan kepada negara penjajah ini. Marwah lembaga internasional PBB kembali dilecehkan oleh Israel," tukasnya.

Oleh karena itu, lanjut HNW, bila PBB kembali tidak bisa diandalkan karena masih menganut sistem yang 'non-demokratis' dengan tetap digunakannya hak veto oleh Amerika Serikat untuk mendukung Israel, maka negara-negara anggota PBB sebagaimana telah dicontohkan oleh beberapa negara di Amerika Latin itu, tetap memiliki kedaulatannya sendiri termasuk untuk memutuskan hubungan dengan Israel yang terus melakukan kejahatan kemanusiaan dan

tidak menaati hukum internasional.

"Kita tentu berharap agar PBB dapat direformasi dengan pengambilan keputusan yang demokratis. Tapi kalau tetap belum bisa dilaksanakan, maka negara-negara anggota PBB, termasuk yang tergabung dalam OKI dan Liga Arab, juga memiliki kedaulatan untuk memberikan 'sanksi' kepada Israel dengan memutus hubungan diplomatik atau menarik duta besarnya seperti yang dilakukan oleh negara-negara di kawasan Amerika Tengah dan Amerika Selatan yaitu Nikaragua, Bolivia, Kolombia dan Cile, padahal mereka tidak terhubung secara nasionalisme maupun agama dengan warga Gaza/Palestina, berbeda dengan negara-negara Liga Arab maupun OKI," pungkasnya.



Bila PBB kembali tidak bisa diandalkan karena masih menganut sistem yang 'non-demokratis' dengan tetap digunakannya hak veto oleh Amerika Serikat untuk mendukung Israel, maka negara-negara anggota PBB sebagaimana telah dicontohkan oleh beberapa negara di Amerika Latin itu, tetap memiliki kedaulatannya sendiri termasuk untuk memutuskan hubungan dengan Israel yang terus melakukan kejahatan kemanusiaan dan tidak menaati hukum internasional.

Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta II



**Kunjungi
Kanal Resmi
Fraksi PKS DPR RI**

-  Website
fraksi.pks.id
-  Instagram
[fraksipksdpri](https://www.instagram.com/fraksipksdpri)
-  Twitter
[@fraksipksdpri](https://twitter.com/fraksipksdpri)
-  Facebook
[Fraksi PKS DPR RI](https://www.facebook.com/fraksi.pks.dpr.ri)
-  Youtube
[PKSTV DPR RI](https://www.youtube.com/playlist?list=PLKSTV DPR RI)

***Ikuti Berita
Parlementaria***
di Kanal Resmi Fraksi PKS